MODEL KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DESA WISATA BERBASIS KEARIPAN LOKAL MENUJU DESA MANDIRI

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang berada di daerah tropis dengan segala potensi sumber daya alam yang dimilikinya. Selain memiliki potensi sumber daya alam yang berlimpah Indonesia juga memiliki potensi wisata yang luar biasa, baik berupa wisata alam maupun wisata budaya yangd a p a t m e m b e r i k a n k o n t r i b u s i b a g i N e g a r a.

Pariwisata merupakan salah satu mesin penggerak ekonomi dan penghasil devisa bagi pembangunan ekonomi negara. Sektor pariwisata dinilai punya potensi besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Setiap daerah di Indonesia memiliki potensi wisata yang punya daya tarik besar. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataan yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan Kepariwisataan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan memeratakan lapangan kerja. Pengembangan Desa Wisata menjadi suatu alternatif agar perkembangan kepariwisataan memberikan kemanfaatan secara sosial, ekonomi dan l i n g k u n g a n b a g i m a s y a r a k a t l o k a l.

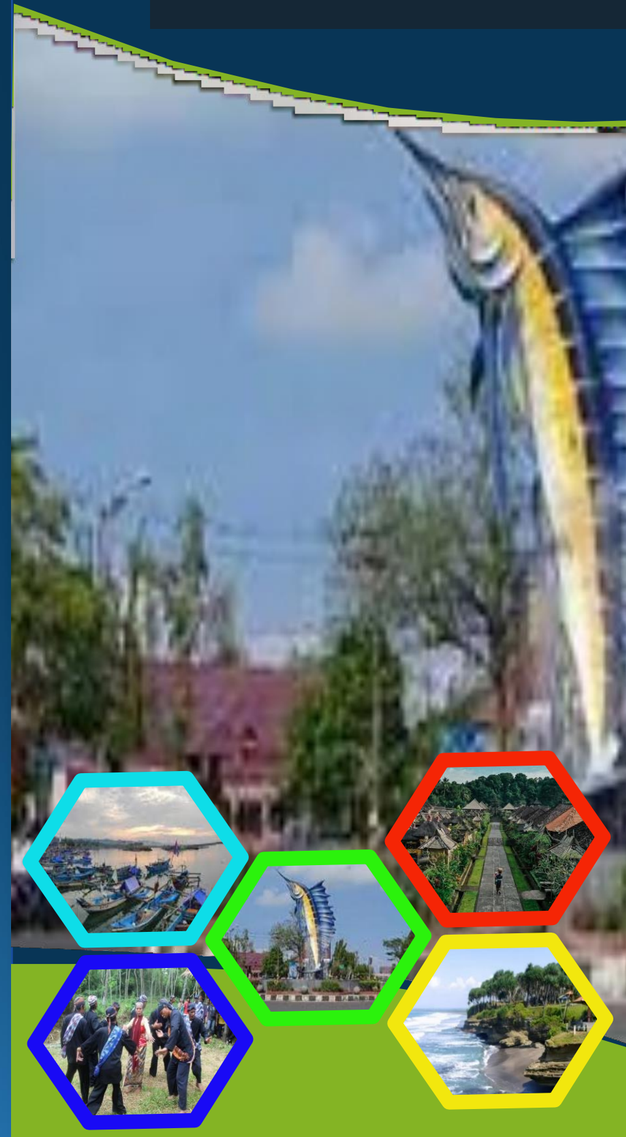
Pengembangan wisata pedesaan yang berbasis pengembangan potensi alam, pertanian, sosial dan budaya lokal dapat menjadi pengembangan potensi masyarakat berbasis pariwisata. Pengembangan masyarakat berbasis agro wisata dapat mengikutsertakan peran dan partisipasi masyarakat pedesaan. Upaya untuk mencapai hal tersebut, diperlukan adanya pembinaan secara sinergis antara para pelaku usaha pariwisata, dan penerintah. Dari hasil penelitian yang kami lakukan , masih banyak permasalahan yang peneliti temukan didalam pengembangan Desa Wista antara lain , belum adanya pemetaan terkait dengan kebutuhan dalam pengembangan desa wisata , tatakelola desa wisata masih bersifat individual, belum adanya perorganisasian d a l a m p e n g e l o l a a n d e s a w i s a t a , d l l.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka tim peneliti memandang perlu dibuatnya sebuah buku panduan tentang pengembangan desa wisata , yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Sumber daya manusia dalam pengelolaan sumber daya yang ada didesa sehingga desa tersebut dapat di katakan sebagai desa wisata , selain itu buku panduan ini pula bisa di jadikan sebagai media informasi bagi pemerintah , masyarakat dan para pelaku pariwisata dalam pengembangan desa wisata berbasis kearifan local, sehingga masyarakat dan para pelaku kepariwisataan memahami dan mengertib a g a i m a n a m e n g e m b a n g k a n d e s a w i s a t a.

CV. Kimfa Mandiri

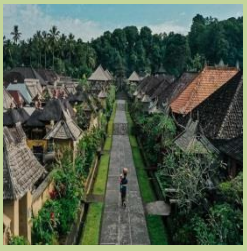
MODEL KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DESA WISATA BERBASIS KEARIFAN LOKAL MENUJU DESA MANDIRI DI KABUPATEN PANGANDARAN

MODEL KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DESA WISATA BERBASIS KEARIFAN LOKAL MENUJU DESA MANDIRI



Dr. H Yaya Mulyana Abdul Azis, M.Si
Dr. Abu Huraerah, M.Si
Dr. M Budiana, M.Si
Regan Vaughan, S.I.Kom,.M.AB









CV. KIMFA MANDIRI
2022

MODEL KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DESA WISATA BERBASIS KEARIFAN LOKAL MENUJU DESA MANDIRI

Dr. H Yaya Mulyana Abdul Azis, M.Si
Dr. Abu Huraerah, M.Si
Dr. M Budiana, M.Si
Regan Vaughan, S.I.Kom,.M.AB

Penerbit CV. Kimfa Mandiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Dilarang keras memperbanyak, memfotokopi sebagian atau seluruh isi buku ini, serta memperjualbelikannya tanpa mendapat izin tertulis dari Penerbit.

@2022, Penerbit CV. Kimfa Mandiri, Bandung
(71 halaman) 18,2 x 25,7 cm

Judul Buku:
MODEL KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DESA WISATA BERBASIS KEARIFAN LOKAL MENUJU DESA MANDIRI

Penulis:
Dr. H Yaya Mulyana Abdul Azis, M.Si
Dr. Abu Huraerah, M.Si
Dr. M Budiana, M.Si
Regan Vaughan, S.I.Kom,.M.AB

Editor:
T. Hidayat
Desain Sampul:
Wawan Setiawan
Setting & Layout Isi:
Wawan Setiawan
Sumber gambar pada sampul dan awal bab: adaptasi dari berbagai sumber

Penerbit:
CV. Kimfa Mandiri
JL. Raya Ciapus Rt 01 Rw 06 Desa. Ciapus Kec. Banjaran Kab Bandung 40377
Telp: 022-85945637 - 085314983618 - 081220816826
E-mail: kimfamandiriks@gmail.com

Cetakan Kesatu, 2022
ISBN : 000.000.000.00-00

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, pada akhirnya modul yang berjudul, MODEL KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DESA WISATA BERBASIS KEARIFAN LOKAL MENUJU DESA MANDIRI ini pada akhirnya dapat selesai. Mudah-mudahan out put dari Hibah penugasan ini dapat bermanfaat juga bagi setiap stake holder yang berkaitan dengan pengembangan desa wisata.

Seperti kita maklumi bersama, bahwa pariwisata merupakan salah satu mesin penggerak ekonomi dan penghasil devisa bagi pembangunan ekonomi negara.Sektor pariwisata dinilai punya potensi besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Setiap daerah di Indonesia memiliki potensi wisata yang punya daya tarik besar, termasuk di dalamnya desa wisata. Pariwisata memiliki spektrumfundamental pembangunan bangsa yang luas mulai dari sebagai alat persatuan dan kesatuan bangsa, penghapusan kemiskinan *(poverty alleviation)*, pembangunan berkesinambungan (sustainable development), dan peningkatan ekonomi.

Pemerintah Indonesia saat ini telah menetapkan Pariwisata sebagai suatu sektor strategis penghasil devisa negara. Tujuan utama dari pembangunan sektor pariwisata terkait dengan pembangunan pada aspek sosial budaya, ekonomi dan politik. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataan yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan Kepariwisataan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan memeratakan lapangan kerja.

Tidak berlebih jika modul ini dimaksudkan sebagai panduan dan modul bagi para pegiat desa wisata untuk mengembangkan desanya. Mudah-mudahan modul ini memberikan referensi terhadap persoalan pengembangan desa wisata yang relatif masih sedikit dalam bentuk teks Book. Terimakasih Kepada semua pihak, khsusunya Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang memberika hibah penugasan ini, Rektor Unpas dan Lemlit serta kepada para penulis yang telah berkontribusi dalam penulisan modul ini serta penerbit. Semoga bermanfaat.

Bandung, 31 Oktober 2022

Tim Penulis:

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

I. PENDAHULUAN

Bagian.1. Latar Belakang, Rumusan Masalah, tujuan ,sasaran dan out penyusunan buku

1. Latarbelakang 1
2. Tujuan Penyusunan Buku 8
3. Sasaran Pednyusunan Buku 8
4. Output Penyusunan Buku 9

II. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DESA WISATA

Bagian.1 Pengertian, Konsep Kebijakan, Karakteristik Model Kebijakan Teori Kebijakan

1. Konsep Kebijakan Publik 10
2. Karakteristik Model Kebijakan 13
3. Konsep Implementasi Kebijakan 13
4. Model Proses Implementasi Kebijakan 19

Bagian . 2 Teori Kebijakan

1. Model Edward III 21
2. Model Daniel A Mazmanian 25
3. Model Nugroho 28

Bagian. 3. Pengembangan Pariwisata, Pengembangan Desa Wisata, Pengembangan dan Pengelolaan Desa Wisata, Kearifan Lokal dalam Pengembangan Desa Wisata

1. Pengembangan Pariwisata 30
2. Pengembangan Desa Wisata 34
3. Pengembangan dan Pengelolaan Desa Wisata 37
4. Kearifan Lokal dalam Pengembangan Desa Wisat 38

III. KONSEP PENGEMBANGAN DESA WISATA BERBASIS KEARIPAN LOKAL

Bagian 1 Konsep Pengembangan Desa Wisata

1. Konsep Pengembangan Desa Wisata 40

2. Konsep Kawasan Desa Wisata 42
3. Pendekatan Kawasn Desa Wisata 43

IV. PEMNBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian 1. Pengertian, Tujuan, dan Tingkatan Keberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat 47
2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat 50
3. Tingkatan Keberdayaan Masyarakat 51

Bagian. 2 Aspek dan Indikator Pemberdayaan Masyarakat

1. Aspek-aspek Pemberdayaan Masyarakat 52
2. Indikator Pemberdayaan Masyarakat 53

Bagian 3 Keterlibatan Berbagai Elemen dalam Pemberdayaan Masyarakat

1. Elemen-elemen Pemberdayaan Masyarakat 56
2. Mekanisme Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat 56

Bagian.4. Proses Pemberdayaan Masyarakat

1. Proses Pemberdayaan Masyarakat 58

Bagian.5 Pendekatan dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat

1. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat 63
2. Metode Pemberdayaan Masyarakat 65
3. Strategi Pemberdayaan Masyarakat 65

Daftar Pustaka

DAFTARN ISTILAH

CSR	Corporate Social Responsibility adalah bentuk tanggungjawab sosial sebuah perusahaan terhadap lingkungan di sekitarnya. Tanggung jawab tersebut dapat berbentuk dukungan pemberdayaan komunitas pariwisata desa.
DESA	Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 6 tahun 2014).
DESA WISATA	Desa wisata merupakan suatu daerah tujuan wisata atau disebut pula destinasi pariwisata, yang mengintegrasikan daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku (UU No. 10 tahun 2009; Nuryanti, 1993).
DESA MANDIRI	Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik
DESTINASI WISATA	Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang erada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di alamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan (UU No.10 tahun 2009).
KAWASAN PERDESAAN	Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi (UUNo.26 tahun 2007).
KEPARIWISATAAN	Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha (UU No. 10 tahun 2009).
	Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan

	oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah (UU No.26 tahun 2007).
KEARIPAN LOKAL	Pandangan hidup dan ilmu pengetahuan, serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka.
PARIWISATA BERBASIS KOMUNITAS	Pariwisata yang memedulikan keberlangsungan kehidupan lingkungan alam, ekonomi, dan sosial dan budaya, dan menempatkan masyarakat sebagai perencana, pengelola dan pemilik, demi memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pariwisata berbasis masyarakat bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk mempelajari alam dan kehidupan masyarakat lokal guna mendapatkan pengalaman dan kepuasan selama perjalanannya.
PRODUK PARIWISATA	Pengalaman total yang diterima oleh wisatan mulai dari saat kedatangan hingga saat meninggalkan destinasi pariwisata yang ditujunya
PARIWISATA PERDESAAN	Pariwisata yang mendayagunakan sumber daya perdesaan. Kegiatan pariwisata dapat dilakukan di desa wisata maupun bukan desa wisata.
WISATA DESA	Kegiatan wisata yang berlangsung di desa. Tujuan perjalanan tidak selalu berbasis pada sumber daya wisata bersifat perdesaan sepanjang berlokasi di desa. Pelaku perjalanan wisata dapat menginap (wisatawan) atau tidak menginap (pelancong
PRODUK PARIWISATA	Kegiatan wisata yang berlangsung di kawasan perdesaan dengan tujuan utama untuk mengonsumsi sumber daya wisata perdesaan berupa keunikan alam dan budaya lokal. Pelaku perjalanan wisata juga dapat menginap (wisatawan) atau tidak menginap (pelancong).



I PENDAHULUAN

Bag 1

Bagian.1

Latar Belakang, Rumusan Masalah, tujuan ,sasaran dan Layout penyusunan buku

1. Latarbelakang

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang berada di daerah tropis dengan segala potensi sumber daya alam yang dimilikinya. Selain memiliki potensi sumber daya alam yang berlimpah Indonesia juga memiliki potensi wisata yang luar biasa, baik berupa wisata alam maupun wisata budaya yang dapat memberikan kontribusi bagi pembiayaan berupa devisa. Menurut Yoeti pariwisata merupakan salah satu katalisator pembangunan suatu bangsa, selain mampu memberikan kontribusi pembangunan bangsa dengan meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan penerimaan pajak. (Yoeti, 2008) Melalui kegiatan kepariwisaan yang berupaya untuk memberdayakan masyarakat setempat (Ritchi et al, 2018) ,hal tersebut diharapkan mampu mempercepat pemerataan pendapatan penduduk sekaligus memperkuat posisi neraca pembayaran yang kemudian berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Kartikasari, 2016). Secara teori kunjungan para wisatawan tentunya merupakan salah satu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pariwisata merupakan salah satu mesin penggerak ekonomi dan penghasil devisa bagi pembangunan ekonomi negara. Sektor pariwisata dinilai punya potensi besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Setiap daerah di Indonesia memiliki potensi wisata yang punya daya



tarik besar. Pada tahun 2019 lalu, pariwisata menyumbang kontribusi sebesar 4,7 % untuk PDB Indonesia. Pariwisata memiliki spektrum fundamental pembangunan bangsa yang luas mulai dari sebagai alat persatuan dan kesatuan bangsa, penghapusan kemiskinan (*poverty alleviation*), pembangunan berkesinambungan (*sustainable development*), dan peningkatan ekonomi

Indonesia memiliki peluang perkembangan pariwisata masa depan yang cerah. Tidak saja karena terbukanya peluang untuk meraih jumlah wisatawan dunia yang semakin banyak , selama tahun 2016 mencapai jumlah wisatawan 11,52 juta kunjungan atau naik 10,69 persen dibandingkan jumlah kunjungan wisman pada periode yang sama tahun sebelumnya yang berjumlah 10,41 juta kunjungan. Banyaknya potensi sumber daya yang tersedia, khususnya sumber daya alam dan budaya (BPS, 2016) yang menjadi daya tarik para wisatawan dan banyaknya permintaan pasar wisata dunia setiap tahu selulau mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

Berdasarkan data yang kami dapat dari website Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa tingkat kunjungan wisatawan dapat di lihat pada data berikut ini :

a. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman ke Indonesia Desember 2016 naik 12,85persen dibanding bulan yang sama tahun sebelumnya, yaitu dari 986,5 ribu kunjungan menjadi 1,11 juta kunjungan. Begitu pula, jika dibandingkan dengan November 2016, mengalami kenaikan sebesar 11,07 persen.
b. Secara kumulatif, jumlah kunjungan wisman ke Indonesia selama tahun 2016 mencapai 11,52 juta kunjungan atau naik 10,69 persen dibandingkan jumlah kunjungan wisman pada



periode yang sama tahun sebelumnya yang berjumlah 10,41 juta kunjungan.

c. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di 27 provinsi pada Desember 2016 mencapai ratarata 56,50 persen atau turun 0,75 poin dibandingkan dengan TPK Desember 2015 yang tercatat sebesar 57,25 persen. Sementara itu, jika dibanding TPK November 2016, TPK hotel berbintang pada Desember 2016 naik 0,74 poin.
d. Rata-rata lama menginap tamu asing dan Indonesia pada hotel berbintang di 27 provinsi selama Desember 2016 tercatat sebesar 1,70 hari, terjadi penurunan 0,13 poin jika dibandingkan keadaan Desember 2015.

Indonesia merupakan salah satu Negara di ASEAN yang memiliki potensi wisata yang sangat dan itu tersebar hamper diseluruh negeri. Saat ini pemerintah sedang intensi dan mendorong para pelaku usaha untuk mengembangkan potensi wisata yang ada di daerah, bukan saja meningkatkan potensi yang ada di daerah perkotaan saja. Sebagaimana diketahui, pemerintah pusat, melalui KementerianPariwisata Kabinet Kerja (2015-2019)telah menetapkan bahwa program pengembangan desa wisata menjadi salah-satu agenda prioritas..

Dalam pemgembangan desa wisata di Indonesia Sandiago Uno menyebutkan bahwa dalam upaya pengembangan desa wisata , pemerintah desa dapat mengembang desa berdasark potensi masing masing desa , lebih lanjut Sandiago Uno menyhebutkan ada tiga kriterian desa wisata berdasarkan katagori desa yaitu:

a. **Desa Wisata Rintisan**;

   Desa Wisata Rintisan yang merupakan desa wisata yang masih berupa potensi sebagai desa wisata. Sarana prasarana



desa wisata rintisan terbilang terbatas, sehingga belum maupun masih sedikit kunjungan dari wisatawan. Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata belum sepenuhnya tumbuh.

"Sehingga sangat diperlukan pendampingan dari pihak terkait dalam penggembanganya ke depan,"

b. **Desa Wisata Maju Dan Berkembang**;

desa wiata yang sudah ada kunjungan dari wisatawan dari luar daerah. Sarana prasarana dan fasilitas juga sudah berkembang, sehingga mulai tercipta lapangan kerja bagi penduduk daerah. Selain itu juga didukung akan kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata tumbuh.

c. **Desa Wisata Mandiri.**

Desa wisata mandiri adalah desa wisata yang penduduknya mampu berinovasi dalam pengembangan potensi desa menjadi unit kewirausahaan mandiri

Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang cukup serius mengembangkan potensi wisata di daerahnya. Dari 50 destinasi pariwisata nasional yang ditetapkan pada rencana induk pembangunan pariwisata nasional tiga diantaranya berada di provinsi Jawa Barat, yaitu; Destinasi Bogor-Halimun, Destinasi Bandung-Ciwidey, dan Destinasi Pangandaran. Melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 48 tahun 2006, Provinsi Jawa Barat menetapkan rencana induk pengembangan pariwisatanya (Peraturan Daerah (PERDA) Nomor. 51 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2025). Wilayah Jawa Barat Selatan, kini menjadi daerah yang mendapatkan perhatian khusus mengingat potensi sumberdaya alam yang cukup melimpah dan kemudian berpotensi sebagai kawasan wisata andalan. (Iwang Gumilar et al, 2015) Salah satu



kawasan wisata andalan di Provinsi Jawa Barat adalah area wisata Pangandaran, dimana di kawasan tersebut mempunyai beberapa kawasan pengembangan pariwisata yang cukuppotensial. Saat kawasan pangandaran masih termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Ciamis kontribusi sektor pariwisata sangat kentara. Total Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata Kabupaten Ciamis sebagian besar didominasi oleh kawasan Pangandaran. Disebutkan dalam bahwa Kabupaten Ciamis kehilangan PAD sebesar 85% atau mencapai 6 miliar atas terlepasnya wisataPangandaran yang kini beralih dan menjadi bagian Kabupaten Pangandaran. (Sondarika, et al, 2017)

Pemerintah Indonesia saat ini telah menetapkan Pariwisata sebagai suatu sektor strategis penghasil devisa negara. Tujuan utama dari pembangunan sektor pariwisata terkait dengan pembangunan pada aspek sosial budaya, ekonomi dan politik. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataan yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan Kepariwisataan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan memeratakan lapangan kerja.

Pengembangan wisata pedesaan yang berbasis pengembangan potensi alam, pertanian, sosial dan budaya lokal dapat menjadi pengembangan potensi masyarakat berbasis pariwisata. Pengembangan masyarakat berbasis agro wisata dapat mengikutsertakan peran dan partisipasi masyarakat pedesaan (Rorah, 2015). Hal ini sejalan dengan pengembangan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimilikinya. Hal yang harus menjadi perhatian dalam pengembangan desa wisata yakni bagaimana masyarakat bisa didorong dan dikembangkan secara berkesinambungan, sehingga potensi yang dimiliki desa dan masyarakat dapat dikembangkan secara optimal.



Melalui penggalian potensi desa dan masyarakat secara berkesinambungan maka pengembangan desa wisata dapat berdampak maksimal bagi kesejahteraan petani dan masyarakat desa. Dengan demikian, perkembangan suatu kawasan wisata tidak lepas dari pengembangan dan penggalian potensi-potensi wisata itu sendiri mulai dari dilevel daerah atau yang paling rendah (Adityaji, 2018)

Upaya untuk mencapai hal tersebut, diperlukan adanya pembinaan secara sinergis antara para pelaku usaha pariwisata, dan penerintah. Hal tersebut membuat para pelaku usaha pariwisata akan dapat merencanakan, menyusun, memprogramkan desa wisata berbasis pada kemampuan masyarakat dan potensi desa. Dalam hal ini perlu adanya koordinasi antar pihak yang berkepentingan sehingga dengan terjalinnya koordinasi antara pihak maka tujuan pengembangan desa wisata akan tercapai. Tidak hanya sebatas pembinaan saja pembangunan kepariwisataan tentunya harus didukung dengan peningkatan sumber daya manusia termasuk juga peningkatan kapasitas para pelaku usaha wisata dan pengelola desa wisata.

Kabupaten Pangandaran merupakan kabupaten yang memiliki potensi pariwisata yang sangat besar. Potensi ini bisa dilihat dari potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Selain itu, Kabupaten Pangandaran memiliki potensi pertanian yang sangat besar. Berdasarkan undang-undang nomor 21/2012 Kabupaten Pangandaran terdiri atas 10 Kecamatan dan Kecamatan Parigi sebagai ibu kota. Salah satu daerah yang memiliki potesi besar menjadi desa wisata selasari

Kondisi geografis Kabupaten Pangandaran yang memiliki banyak potensi wisata menjadi sebuah kekayaan daerah yang dimiliki. Terdapat potensi wisata di Kabupaten Pangandaran salah satunya Pantai



Pangandaran, Pantai Batu Karas, Pantai Karapyak, Green Canyon (Cukang Taneuh), Pantai Batu Hiu, Curug Citumang, Pantai Madasari, Pantai Karang Nini, Curug Bojong, Cagar Alam Pananjung, Pantai Keusik Luhur, Santirah River Tubing, Saung Muara, Desa Wisata Selasari, Pantai Karang Tirta, Goa Sumur mudal dan Air Terjun Curug Jojogan. Kondisi eksisting kekayaan potensi daerah yang melimpah di sektor kepariwisataan tidak berhenti sampai disitu. Perlu upaya pengembangan dan eksploitasi destinasi wisata baru kedepannya

Kegiatan pariwisata tidak bisa lepas dari kebudayaan atau kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dalam kegiatan pariwisata akan terjadi interaksi budaya antara wisatawan dan masyarakat setempat. Seorang wisatawan berkunjung ke wilayah wisata yang kebudayaan lebih tinggi dari kehidupannya maka akan terjadi pembelajaran budaya pada dirinya. Dalam hal ini, wisatawan tersebut memiliki kesempatan untuk belajar dan meningkatkan kebudayaan yang di miliki. Namun demikian saat ini desa masih memiliki beberapa kendala, antara lain:

a. Berkurangnya sumber daya manusia perdesaan yang berkualitas akibat semakin besarnya angka migrasi penduduk dari desa ke kota ;
b. Produktivitas sumber daya perdesaan yang tidak dapat bersaing dengan sumber daya perkotaan menyebabkan semakin lemahnya posisi tawar perdesaan dalam konteks pembangunan nasional;
c. Kegiatan pembangunan pariwisata di perdesaan sering dilakukan kurang tepat dalam penerapan pola pembangunan wisata massal yang merusak lingkungan. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat diandalkan untuk memperbaiki kondisi ini. Mendorong pertumbuhan pariwisata di



desa tidak hanya akan dapat meningkatkan perekonomian lokal namun juga peningkatan nilai sosial budaya dan pelestarian lingkungan. Jenisjenis minat wisata terkait langsung dengan hal ini antara lain wisata alam, wisata pantai, wisata agro, wisata budaya, wisata kreatif, dan wisata petualangan yang memiliki akar kuat pada sumber daya perdesaan

Berdasarkan beberapa latar belakang di atas dan memperhatikan kebutuhan akan pengelolaan pariwisata yang lebih baik dalam pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Pangandaran , maka tim peneliti Universitas Pasundan melakukan penyusun modul pengembangan desa wisata berdasarkan teori-teori dan didukung dengan data empiris dalam rangka pengembangan desa wisata di Kabupaten Pangandaran. Adapun berdasarkan hal tersebut maka judul buku yang tim susun berjudul "**Model Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal Menuju Desa Mandiri**"

2. Tujuan Penyusunan Buku

a. Mengidentifikasi berbagai peranan masing-masing Kementrian atau Lembaga lembaga Pusat dan pihak lainnya dalam pengembangan Desa Wisata
b. Menjadikannya dasar panduan bagi berbagai pihak seperti pemerintah pusat, daerah dan swasta yang ingin mengembangkan dan mengelola suatu wilayah menjadi Desa Wisata
c. Menjadikannya bahan informasi bagi pemerintah daerah dan pihak lainnya dalam rangka sinergitas dan optimalisasi program masing-masing pihak di lokasi sasaran program;



d. Memberikan pemahaman mengenai Desa Wisata dan pengelolaannya melalui pembahasan yang disederhanakan.
e. Meningkatkan kompetensi dalam Pengelola Desa wisata
f. Mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan melalui implementasi konsep *Community Based Tourism* (CBT).
g. Memberikan semangat baru bagi perangkat desa dan kelembagaan pariwisata di desa untuk membangun wisata didesa
h. Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata yang membawa manfaat pada kesejahteraan masyarakat

3. Sasaran Penyusunan Buku

a. Meningkatnya pemahaman mengenai Desa Wisata dalam pengelolanya.
b. Meningkatnya kemampuan para pengelola Desa wisata
c. Memberikan motivasi dalam pengelolaan dan pemngembangan desa wisata
d. Meningkatnya sumber perekonomian masyarakat dalam menunjang kesejahteraan Masyarakat

4. Out Put Penyusunan Buku

a. Sebagai Pelaporan Dalam Pelaksanaan Penelitian Penugasan Dosen Tahun 2022 Dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
b. Publikasi ilmiah dari hasil penelitian
c. Sebagai bahan pembelajaran bagi mahasiswa, pelaku usaha kepariwisataan dan para *stakeholder*



II KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DESA WISATA

Pengantar

Konsep kebijakan publik menurut Sulaiman adalah sebagai suatu proses yang mengandung berbagai pola berbagai aktivitas tertentu yang merupakan seperangkat keputusan yang bersangkutan dengan tindakan untuk mencapai tujuan dalam beberapa cara yang khusus, dengan demikian, maka konsep kebijakan publik berhubungan dengan tujuan pola aktivitas pemerintahan mengenai sejumlah masalah serta mengandung tujuan

Bagian . 1

Pengertian, Konsep Kebijakan, Karakteristik Model Kebijakan Teori Kebijakan,

Tujuan pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini, peserta diharapkan mampu:

- Memahami pengertian Konsep Kebijakan
- Menjelaskan tentang tujuan Kebijakan
- Menjelaskan tentang Kebijakan

1. Konsep Kebijakan Publik

Secara konseptual kebijakan publik dapat dilihat dari Kamus Administrasi Publik Chandler dan Plano dalam Pasolong (2013:38) menyebutkan, bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah.

Dye (1978) yang dikutip Wahab (2008), bahwa *public policy is whatever governments choose to do or not to do* (kebijakan publik merupakan pilihan pemerintah tentang apa yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan. Pengertian tersebut mengarah pada tindakan



pemerintah dalam berbagai sektor, semisal politik, ekonomi, sosial yang bersifat dinamis, dimana pemerintah menjadi satu-satunya otoritas dalam pengambilan kebijakan publik. Wibawa (1994) menyebutkan, tiga hal utama dalam kebijakan publik, yakni tujuan yang luas, sasaran yang spesifik dan cara untuk mencapai sasaran tersebut. Dua hal utama, tujuan yang luas dan sasaran yang spesifik, kemudian diterjemahkan dalam program aksi dan proyek. Hal ketiga, yakni cara untuk mencapai sasaran merupakan komponen yang berfungsi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, yang kemudian disebut sebagai implementasi.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan, bahwa kebijakan publik harus memenuhi dua hal utama, yakni, pertama dibuat oleh institusi yang memiliki otoritas (pemerintah) dan kedua adalah kebijakan tersebut diarahkan kepada masyarakat yang memberi otoritas kepada pengambil kebijakan. Suatu keputusan menjadi kebijakan publik jika mengandung unsur kepentingan masyarakat.

Kebijakan sebagai suatu proses berarti pembuatan kebijakan tidak selesai setelah kebijakan tersebut ditentukan ataupun disetujui. Namun, hal ini berarti ada sebuah tindakan pasca proses kebijakan agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Tindakan inilah yang disebut sebagai suatu implementasi kebijakan.

Menurut Grindle dalam Wibawa (1994) terdapat dua faktor yang menentukan implementasi kebijakan publik, yakni isi kebijakan dan konteks kebijakan. Isi kebijakan, meliputi : (Samodra Wibawa, 1994)

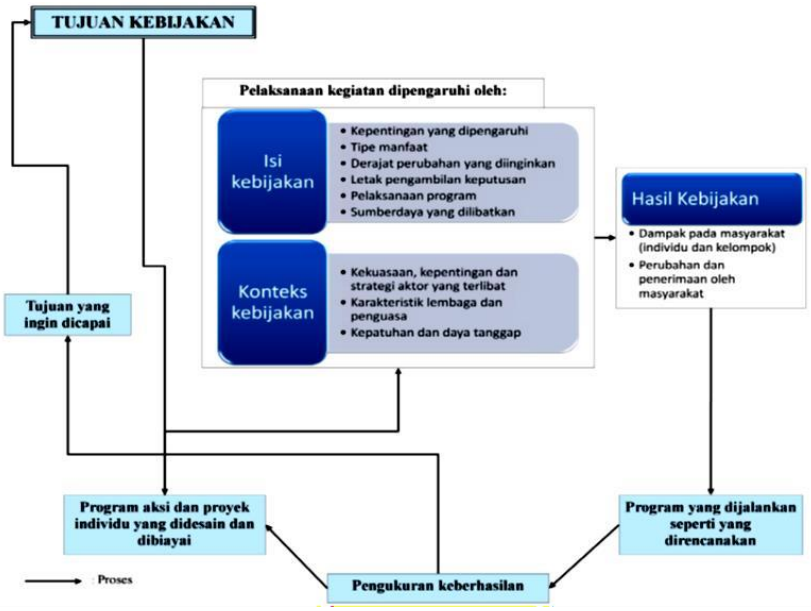
a. Kepentingan-kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan. Kebijakan yang menyangkut kepentingan orang banyak akan cenderung lebih sulit untuk diimplemetasikan daripada



kebijakan yang menyangkut kepentingan orang dalam skala kecil. Hal tersebut wajar mengingat kebijakan merupakan suatu proses politik yang sarat akan kepentingan;

b. Jenis manfaat yang didapatkan dari implementasi kebijakan. Kebijakan yang akan memberi manfaat lebih besar tentunya mendapat dukungan berbagai pihak sehingga implementasinya lebih mudah. Manfaat kebijakan terkait dengan tingkat perubahan yang dikehendaki dengan adanya kebijakan yang dimaksud;
c. Tingkat perubahan yang diinginkan. Tingkat perubahan dapat disesuaikan dengan dimensi waktu. Untuk jangka waktu yang lama, tingkat perubahan dapat dilaksanakan secara perlahan sehingga proses implementasi juga lebih mudah. Hal ini tentu saja berbeda apabila suatu kebijakan yang menghendaki adanya perubahan mendasar dalam perilaku kehidupan masyarakat yang menjadi objek kebijakan. Dalam hal ini, implementasi kebijakan akan lebih sulit dilakukan;
d. Tempat pembuatan kebijakan. Tempat pembuat kebijakan mengandung pengertian kedudukan pembuat kebijakan;
e. Aktor implementasi kebijakan. Aktor implementasi kebijakan meliputi pembuat dan penerima kebijakan (sasaran kebijakan);
f. Sumberdaya yang tersedia. Sumber daya yang dialokasikan dalam kebijakan juga akan mempengaruhi implementasinya. Jumlah sumber daya yang besar akan mempermudah implementasi kebijakan; Konteks kebijakan, meliputi :
    1) Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat;
    2) Karakteristik lembaga dan penguasa;
    3) Kepatuhan dan daya tanggap.

Gambar Model Kebijakan menurut Grindle dalam Wibawa (2014)



2. Karakteristik Model Kebijakan

Secara garis besar bahwa model dalam kebijakan publik itu memiliki karakteristik, sifat dan ciri tersendiri. Karakteristik tersebut antara lain ialah : Model dalam kebijakan publik itu harus sederhana & jelas *(clear)*. Ketepatan dalam indentifikasi aspek penting dalam problem kebijakan itu sendiri *(precise).* Menolong untuk pengkomunikasian *(communicable)*. Usaha langsung untuk memehami kebijakan publik secara lebih baik *(manageable)*. Memberikan penjelasana & memprediksi konsekuensi *(consequences)*.

3. Konsep Implementasi Kebijakan

Berbagai literatur yang mengkaji implementasi kebijakan memaparkan bahwa implementasi kebijakan, tidak hanya membahas berkaitan dengan mekanisme operasional kebijakan ke dalam prosedur-prosedur birokrasi melainkan juga terkait dengan

masalah konflik keputusan. Oleh karena itu, guna memahami proses implementasi kebijakan, kiranya penting untuk memahami beberapa konsep implementasi kebijakan yang telah dikemukakan oleh para pakar kebijakan publik, untuk dijadikan rujukan dalam menstrukturkan konsep teoritik dalam penelitian ini.

Implementasi kebijakan menurut (Thomas, 2005) : *"Implementation involves all the activities designed to carry out the policies enacted by the legislative branch".* Pemikiran ini menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan publik merupakan pelaksanaan yang meliputi segala kegiatan yang dipolakan untuk menyelenggarakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif. Penekanan implementasi kebijakan pada keputusan-keputusan yang telah ditetapkan lembaga-lembaga, yang memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan yang mengikat kepentingan publik, sejalan dengan pendapat Mazmanian dan Sabatier (Agustino, 2020) sebagai berikut :

> "Implementasi kebijakan publik merupakan pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya".

Sementara itu, Meter dan Horn (Winarno, 2002) mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi kebijakan, yang lebih menekankan pada tindakan-tindakan para pelaksana kebijakan, untuk mencapai tujuan sesuai keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dalam kebijakan, adapun pendapatnya seperti berikut :

> "Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok



pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan".

Merujuk pada pemikiran-pemikiran dari ketiga ahli tersebut di atas, memberikan pemahaman pada peminat studi kebijakan publik, ada beberapa hal yang mendasar dalam implementasi kebijakan publik, yang meliputi tentang tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan hasil kegiatan yang dicapai. Dengan kata lain bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis dan berkesinambungan. Para pelaksana kebijakan melaksanakan kegiatan, sehingga mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan tersebut.

Berikutnya, pendapat yang dirujuk dari Grindle (Tachjan., 2008), di mana pemikirannya menjelaskan bahwa implementasi kebijakan publik memiliki keterkaitan dengan tindakan-tindakan dalam administrasi, sebagaimana pandangannya yang dinyatakan berikut ini : *"Public policy implementation a general process of administrative action that can be investigated at specific program level".* Bila mengacu pada pernyataan tersebut, sesungguhnya telah memberikan pemahaman bahwa implementasi kebijakan publik merupakan setiap proses kegiatan administratif secara keseluruhan, yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/disetujui. Jadi dengan demikian, pelaksanaan kebijakan mengandung makna sebagai suatu keputusan yang berisi berbagai tingkatan mengenai rencana-rencana maupun program-program telah ditetapkan dan harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagai pelaksana kebijakan, melalui perangkatnya berupa lembaga-lembaga adminstratif sesuai bidang tugas, fungsi dan tingkatannya dari masing-masing satuan kerja di lingkungan lembaga administratif tersebut, dalam rangka melaksanakan program yang telah ditetapkan, dengan maksud



untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan program, sehingga dapat mencapai sasaran rencana-rencana maupun program-program tersebut.

Pelaksanaan kebijakan baik oleh lembaga pemerintah maupun lembaga swasta, akan tergantung pada keadaan negara bersangkutan oleh karena itu, sering terjadi tingkat perbedaan keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan. Hal ini, sangat dipengaruhi juga oleh suatu kenyataan kondisi negara bersangkutan, apakah masih dalam kategori berkembang, atau negara tersebut sudah dianggap negara maju. Selain itu, pada dasarnya keberhasilan dalam implementasi kebijakan ditentukan juga oleh kegiatan-kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengendalian dan pengawasan, dalam pelaksanaan kebijakan itu sendiri.

Pertimbangan dan pemahaman tersebut di atas, sesuai rujukan berdasarkan pemikiran Nugroho, (Nugroho, 2014) di mana pandangannya untuk memahami keberhasilan dalam proses implementasi kebijakan perlu mempertimbangkan kondisi suatu negara sebagai berikut :

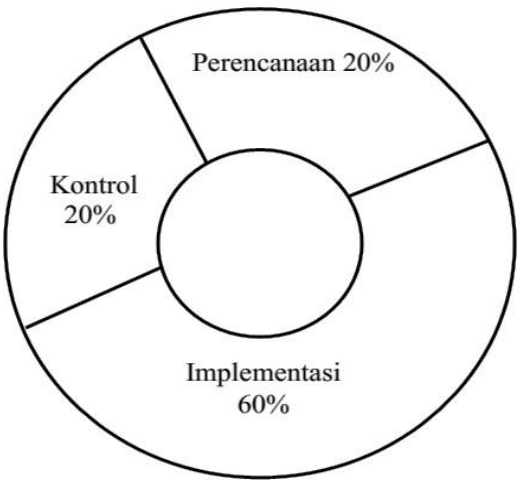
> "Di negara-negara maju, ketika institusional masyarakat sudah mapan, keberhasilan implementasi kebijakan sebagian besar berasal dari perumusan kebijakan yang sangat bagus dan perencanaan. Hal ini berbeda dengan realitas dan berasal dari negara berkembang seperti Indonesia. Keberhasilan kebijakan publik di negara berkembang 20% berasal dari perumusan atau perencanaan yang sangat bagus, sedangkan 60% berkontribusi dari implementasi yang genius, dan dari seberapa berhasil dalam kontrol implementasi".

Mengacu pada pertimbangan tersebut di atas, telah memberikan pemahaman kepada analis kebijakan publik, bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dalam mencapai tujuaanya, dapat mencapai sebesar 60%. Peran implementasi kebijakan dalam

mencapai tujuannya, ditentukan oleh tiga alasan yang meliputi : *Pertama*, alasan dalam hal perumusan. Kebijakan mungkin menjadi terlalu sulit untuk diimplementasikan karena dirumuskan dengan tidak jelas atau ragu-ragu sehingga pelaksana kebijakan tidak mampu untuk melaksanakannya. *Kedua,* alasan karena adanya kontrol yang lemah dalam implementasi kebijakan sehingga terjadi bias, baik disengaja maupun tidak disengaja atau terjadi penyalahgunaan. *Ketiga,* adalah tentang pemerintahan, atau entitas politik bahwa legislatif mungkin menjadikan agenda politik yang berbeda dengan eksekutif, oleh karena itu mereka cenderung melakukan sabotase kebijakan yang disiapkan oleh eksekutif.

Sehubungan dengan berbagai pertimbangan tersebut di atas, selanjutnya (Nugroho, 2014) memberikan gambarannya dalam bentuk suatu model faktor yang menentukan keberhasilan kebijakan publik, yang dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 2.1 . : Faktor yang Menentukan Keberhasilan Kebijakan Publik.



Sumber : Riant Nugroho (2015 : 214)



Nugroho menambahkan bahwa keberhasilan kebijakan dalam mencapai tujuannya ditentukan pula oleh faktor perilaku dari aktor pelaksana kebijakan, sehingga kebijakan yang diimplementasika dapat mencapai sasarannya, adapun pernyataannya itu adalah : (Nugroho, 2014) "Perilaku merupakan variabel dari implementasi kebijakan. Variabel perilaku lebih menentukan keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan". Berdasarkan beberapa pertimbangan ini, telah memberikan penjelasan bahwa dalam proses implementasi kebijakan, indikasinya dapat dilihat dari bagaimana substansi kebijakan itu di rumuskan dalam perencanaan yang menghasilkan program-program atau rencana yang akan direalisasikan.

Selanjutnya, adalah ketika rencana atau program kebijakan tersebut akan dilaksanakan, maka perlu juga ditentukan siapa aktor pelaksananya dan target/sasaran apa yang dipengaruhi oleh implementasi kebijakan itu sendiri. Implementasi kebijakan memiliki peran yang besar dalam mencapai keberhasilan dan tujuan kebijakan, oleh karena itu dalam pelaksanaan kebijakan diperlukan kontrol dari pejabat di atasnya, terhadap perilaku para aktor pelaksana kebijakan, sehingga perilaku aktor pelaksana kebijakan dapat diarahkan untuk pencapaian target dari sasaran kebijakan.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka peranan administrator publik meliputi tugas dan fungsi untuk melaksanakan setiap kebijakan untuk tercapainya tujuan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan pada dasarnya juga mengukur akan keberhasilan atau kegagalan suatu hasil kebijakan yang secara nyata dilaksanakan dilapangan oleh para implementator dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat maupun *stakeholde*r-nya, sebagaimana dikemukakan oleh Saefullah : (Saefullah, 2007)



> "Pada tingkat pelaksanaan kebijakan menyangkut bagaimana atau sejauhmana suatu kebijakan bisa dilaksanakan dalam dunia nyata. Pemahaman tentang pelaksanaan kebijakan bukan hanya dimiliki oleh aparat lembaga dan aparat pelaksana, tetapi juga oleh masyarakat atau pihak-pihak yang menjadi sasaran kebijakan".

Pernyataan di atas, sebenarnya menunjukan bahwa peran, tugas dan fungsi administrator publik, yang akan menentukan berjalan, berhasil atau tidaknya suatu kebijakan, yang telah ditetapkan oleh para *policy maker*, serta merupakan jembatan penghubung antara yang diamanatkan negara bagi kepentingan masyarakat, untuk menerima dan merasakan setiap implementasi kebijakan yang dilaksanakan oleh para administrator publik melalui pendekatan yang kondusif dan intensif melalui sosialisasi kebijakan sebagai langkah pertama, sebagaimana dikemukakan oleh Saefullah. bahwa : (Saefullah, 2007)

> "Langkah awal dalam pelaksanaan kebijakan adalahmelakukan sosialisasi agar kebijakan yang bersangkutan diketahui, dimengerti, dan diterima oleh semua pihak yang bersangkutan". Peran pendekatan melalui sosialisasi yang intensif oleh administrator secara persuasif akan menunjang terhadap terealisasinya implementasi kebijakan melalui setiap program atau kegiatan pemerintah dengan baik dan lancar".

Kondisi lembaga publik dan peran administrator publik sebagai perangkat lembaga pelaksana kebijakan publik tertentu, harus mampu mensosialisasikan kebijakan yang telah ditetapkannya. Oleh karena itu, berhasil tidaknya suatu kebijakan mencapai harapan dan sasarannya, kiranya perlu didukung oleh kemampuan lembaga dan Sumberdaya manusia yang memadai, seperti halnya Katz (Tachjan., 2008) menyatakan :

> "Ketidak berhasilan dalam implementasi kebijakan disebabkan karena petugas-petugas pemerintah tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup untuk merencanakan dan menegakkan organisasi-organisasi, lembaga-lembaga dan cara-

cara yang penting artinya bagi pembangunan di negara mereka sendiri".

4. Model Proses Implementasi Kebijakan

Model dalam proses implementasi kebijakan tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara teoritis, bagaimana unsur-unsur dalam proses pelaksanaan kebijakan dapat dilakukan untuk keberhasilan dalam mencapai target kebijakan tersebut. Sebelum menguraikan model-model kebijakan yang dikemukakan oleh para pakar kebijakan publik, yang telah diakui kebenarannya oleh para peminat studi kebijakan publik diberbagai Negara.

Penyajian beberapa model implementasi kebijakan dari para pakar kebijakan publik, yang akan dipaparkan dalam bagian ini, dimaksudkan untuk memahami bagaimana proses implementasi kebijakan tersebut, untuk itu, perlu penyederhanaan dari konsep implementasi kebijakan, atau yang disebut sebagai model. Hal ini, dijelaskan pula oleh Winarno "Untuk memahami model implementasi kebijakan perlu menyederhanakan, dan untuk menyederhanakan perlu merinci penjelasan-penjelasan tentang implementasi dalam komponen-komponen utama". (Winarno, 2002) Patut diperhatikan di sini, bahwa implementasi dari setiap kebijakan, merupakan suatu proses yang dinamis yang mencakup banyak interaksi dan banyak variable. Oleh karenanya, tidak ada variable tunggal dalam proses implementasi, sehingga perlu dijelaskan keterkaitan antara suatu variabel dengan variable yang lain, dan bagaimana variable-varibel ini mempengaruhi proses implementasi kebijakan.



Bagian. 2

Teori kebijakan ,

Tujuan pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini, peserta diharapkan mampu:

- Menjelaskan tentang Teori Kebijakan
- Menguraikan tentang indikator Kebijakan berdasarkan teori

1. Model Edward III

Model implementasi kebijakan publik yang dikembangkan oleh Edward III (Agustino, 2020). dengan melihat empat faktor atau variabel dalam implementasi kebijakan, sebagaimana diungkapkan sebagai berikut :

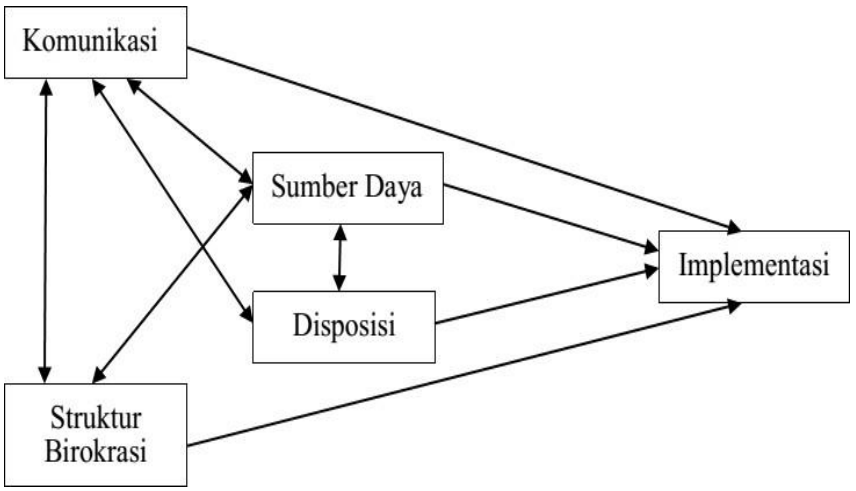
> "*Four critical factor or variable in implementing public policy : communication, resources, disposition or attitudes, and bureaucratic structure.* Terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan dalam implementasi suatu kebijakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi".

Selanjutnya dijelaskan pula, bahwa ke empat faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan bekerja secara simultan, dan berinteraksi satu sama lain, untuk membantu implementasi kebijakan, maka pendekatan yang ideal adalah dengan cara merefleksikan kompleksitas ini dengan membahas semua faktor tersebut sekaligus.

Bagaimana mengenai gambaran model implementasi kebijakan publik yang dikembangkan oleh Edward III, dengan ke empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, yang bekerja secara simultan dan berinteraksi satu sama lain, untuk membantu implementasi kebijakan, serta dapat

menentukan secara langsung maupun tidak langsung keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat di bawah ini :

Gambar 2.1. Model Implementasi Kebijakan Langsung dan Tidak Langsung.



Sumber : Edward III (Agustino, 2020)

Sehubungan dengan model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan di atas, kemudian dijelaskan oleh Edwards III (Agustino, 2020) adapun secara ringkas peneliti simpulkan sebagai berikut :

> Variabel komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan kebijakan. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa pelaksanaan kebijakan yang efektif terjadi, apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan dikerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan dan peraturan pelaksanaan harus ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada para pelaksana di lapangan dengan tepat. Terdapat tiga indikator dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu :
>
> a. Transmisi : penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula;
> b. Kejelasan : komunkasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan;

c. Konsistensi : perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas untuk diterapkan dan dijalankan.

Selanjutnya variabel kedua yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sumber daya. Indikator ini terdiri dari beberapa elemen yaitu :

a. Staf : kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya karena staf yang kurang mencukupi ataupun tidak kompeten dibidangnya, motivasi dalam melaksanakan tugas;
b. Informasi : meliputi informasi yang berhubungan dengan cara bagaimana melaksanakan kebijakan, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang ditetapkan;
c. Wewenang : kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana kebijakan secara politik;
d. Fasilitas : tanpa adanya fasilitas pendukung berupa sarana dan prasarana implementasi kebijakan tidak akan berhasil.

Variabel ketiga adalah disposisi atau sikap pelaksanaan kebijakan, jika para pelaksana kebijakan bersikap baik karena menerima suatu kebijakan maka kemungkinan besar merekaakan melaksanakan secara bersungguh-sungguh seperti tujuan yangdiharapakannya. Sebaliknya jika perspektif dan tingkah laku parapelaksana berbeda dengan para pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami kesulitan. Berdasarkan penjelasan diatas bahwa dalam mendukung *Dispositions* dalam kesuksesan implementasi kebijakan harus adanya kesepakatan antara pembuat kebijakan dengan pelaku yang akan menjalankan kebijakan itu sendiri dan bagaimana mempengaruhi



pelakukebijakan agar menjalakan sebuah kebijakan tanpa keluar dari tujuan yang telah ditetapkan demi terciptanya pelayanan publikyang baik.

Sikap para pelaksana sebagai faktor penentu dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya suatu kebijakan publik. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya suatu kebijakan publik, diantaranya meliputi :

a. Faktor Penentu dilaksanakannya Kebijakan, diantaranya :
   1) Respeknya anggota masyarakat pada otoritas dan keputusan pemerintah;
   2) Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan;
   3) Adanya sanksi hukum;
   4) Adanya kepentingan publik;
   5) Adanya kepentingan pribadi;
   6) Masalah waktu.

b. Faktor penentu penolakan atau penundaan pelaksanaan kebijakan :
   1) Adanya kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai yang dianut;
   2) Tidak adanya kepastian hukum;
   3) Adanya keanggotaan seseorang dalam suatu organisasi;
   4) Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum.

Variabel keempat adalah struktur birokrasi. Birokrasi sebagai pelaksana harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Pelaksana kebijakan mungkin tahu apa yang harus dilakukan dan memiliki keinginan yang cukup dan sumber daya untuk melakukannya, tapi mereka mungkin masih terhambat di implementasi oleh struktur organisasi di mana mereka melayani.



Dua karakteristik utama birokrasi adalah prosedures operasi standar (SOP) dan fragmentasi. Perihal yang pertama berkembang sebagai respon internal, untuk waktu yang terbatas, sumber daya pelaksana, dan keinginan untuk keseragaman kerjasama antar organisasi yang kompleks dan luas, serta merancang program baru, cara kerja baru, dan juga personil dalam melaksanakan kebijakan.

2. Model Daniel A. Mazmanian & Paul A. Sabatier

Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Mazmanian dan Sabatier (Agustino, 2020) dikenal dengan konsep model *A Frame Work for Implementations Analysis*. Model ini, memjelaskan beberapa variabel yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan dalam implementasi kebijakan, yang diklasifikasikan menjadi tiga kategori :

1. *Tractability of the problem implementation* (Mudah tidaknya masalah yang akan dilaksanakan/ dikendalikan);
2. *Ability of policy decision to structure* (Kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasinya);
3. *Non statury variabel affecting implementation* (Pengaruh langsung pelbagai varibel yang termasuk dalam keputusan kebijakan tersebut)".

Berdasarkan model *A Frame Work for Implementations Analysis* tersebut di atas, dapat diketahui bahwa setiap kategori variabel terdiri dari beberapa dimensi. Sedangkan dimensi-dimensi tersebut dijelaskan oleh Mazmanian dan Sabatier (Tachyan, 2008 : 57-60) yaitu :

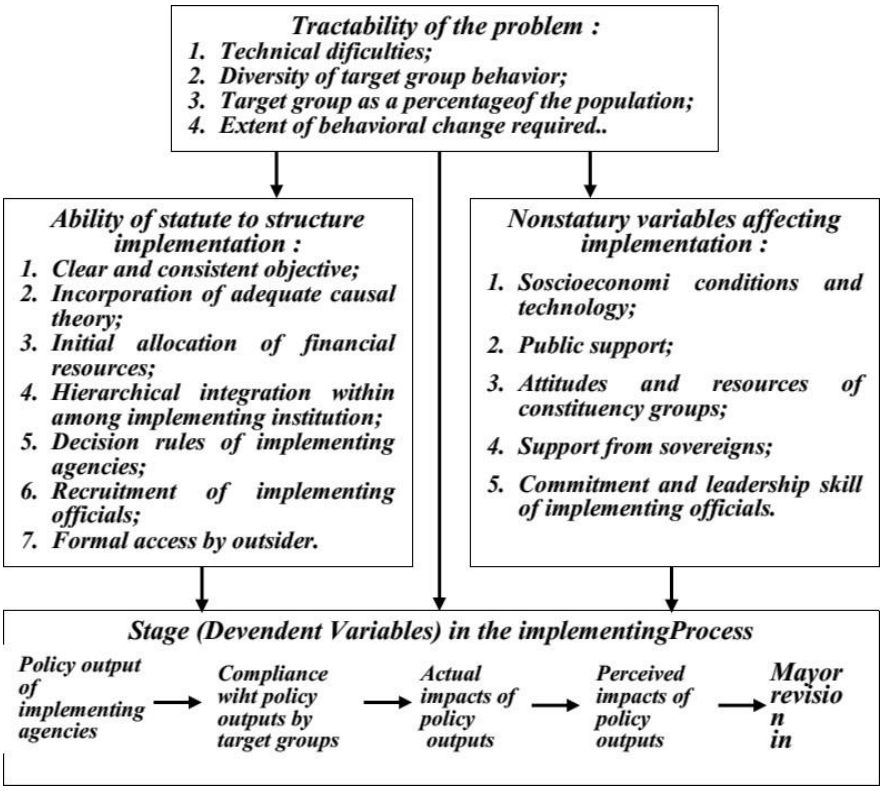
1. Mudah tidaknya masalah yang akan dilaksanakan/ dikendalikan, dengan indikator :

a. kesukaran kesukaran teknis;
b. keragaman perilaku kelompok sasaran;
c. prosentase kelompok sasaran sebanding jumlah jumlah penduduk;
d. Ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan.

2. Kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasinya, dengan indikator :
   a. Kejelasan dan konsistensi tujuan;
   b. Digunakannya teori kausal yang memadai;
   c. Ketepatan alokasi sumber dana;
   d. Keterpaduan hierarki dalam dan diantara lembaga pelaksana;
   e. Aturan-aturan keputusan dari badan pelaksana;
   f. Rekruitmen pejabat pelaksana;
   g. Akses formal pihak luar.
3. Pengaruh langsung pelbagai varibel yang termasuk dalam keputusan kebijakan, dengan indikator :
   a. Kondisi sosio-ekonomi dan teknologi;
   b. Dukungan publik;
   c. Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok-kelompok;
   d. Dukungan dari pejabat atasan;
   e. Komitmen dan kemampuan kepemimpinan pejabat-pejabat pelaksana.

Berkaitan dengan Model *A Frame Work for Implementations Analysis*, Mazmanian dan Sabatier (bentuk gambarannya dapat dilihat di halaman berikutnya : (Tachjan., 2008)

Gambar 2.2. : Model *A Frame Work for Implementations Analysis*.



Sumber : Mazmanian dan Sabatier (Tachjan., 2008)

Adapun mengenai langkah-langkahnya dalam proses implementasi kebijakan sebagai variable yang dipengaruhi (Variabel Tergantung) menurut Mazmanian dan Sabatier , sebagaimana telah diuraikan di atas meliputi : (Tachjan., 2008)



3. Model Nugroho

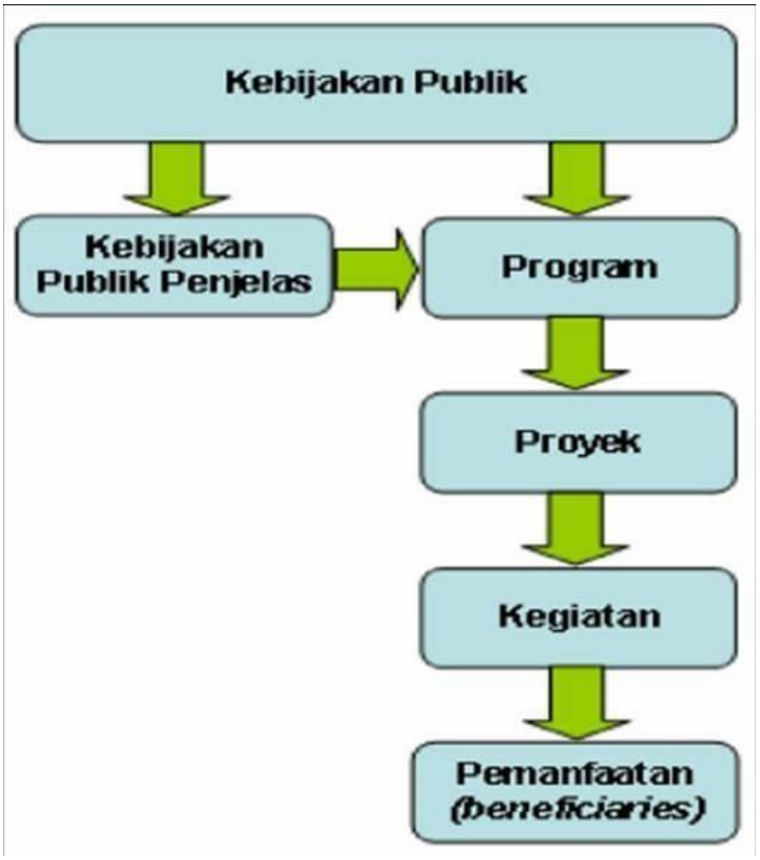
Nugroho mengemukakan model implementasi kebijakan dengan menyatakan pengembangan pemikirannya sebagai model sekuensi implementasi kebijakan, model tersebut pada prinsipnya menjelaskan bentuk pilihan-pilihan sebagai (Nugroho, 2014)

> "Model implementasi kebijakan menggambarkan suatu cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Oleh karena itu, untuk mengimplementasikan kebijakan ada dua pilihan, yaitu langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivasinya atau turunannya".

Sehubungan dengan hal di atas, selanjutnya dijelaskan bahwa kebijakan publik yang isi kebijakannya bersifat teknis dan operasional bisa langsung diimplementasikan melalui program, proyek, dan kegiatan, sehingga manfaatnya bisa langsung diterima atau dirasakan oleh sasaran kebijakan. Kebijakan seperti ini biasanya berbentuk peraturan-peraturan atau keputusan-keputusan pejabat atau pimpinan, untuk menangani suatu masalah tertentu yang bersifat khusus. Sedangkan, mengenai kebijakan-kebijakan yang isi kebijakannya masih bersifat umum, dimana dalam hal pelaksanaannya memerlukan penyesuaian dengan situasi dan kondisi, karakteristik, lingkungan sosial-budaya dari sasaran kebijakan tersebut, biasanya dilakukan perumusan kebijakan turunannya atau derivasinya. Kebijakan seperti ini biasanya berbentuk undang-undang dan peraturan-peraturan kelembagaan lainnya. Misalnya klebijakan yang mengatur mengenai penataan ruang dan wilayah, peraturan tentang pengendalian peredaran minuman keras.

Selanjutnyakera mengenai bentuk dan gambaran umum model sekuensi implementasi kebijakan publik Nugroho (2011:619) dapat dilihat di bawah ini :

Gambar 2.3. : Model Sekuensi Implementasi Kebijakan.



Sumber : Nugroho (2011:619).



Bagian. 3

Pengembangan Pariwisata, Pengembangan Desa Wisata, Pengembangan dan Pengelolaan Desa Wisata, Kearifan Lokal dalam Pengembangan Desa Wisata

Tujuan pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini, peserta diharapkan mampu:

- Menjelaskan tentang Pengembangan Pariwisata, Pengembangan Desa Wisata, Pengembangan dan Pengelolaan Desa Wisata, Kearifan Lokal dalam Pengembangan Desa Wisat
- Menguraikan tentang indikator Pengembangan Pariwisata, Pengembangan Desa Wisata

1. Pengembangan Pariwisata

Konsep pengembangan pariwisata diperkenalkan oleh *Word Commission on Environment and Development* (WCAD) 1987. (Abdilah Fitra) Pengembangan berkelanjutan adalah bagian dari pembangunan berkelanjutan dengan mempertimbangkan kebutuhan saat ini dengan memikirkan kemampuan generasi selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan. Demikian pula WTO (1993) memfokuskan prinsip-prinsip pembangunan yang mencakup:

a. Aspek ekologi yang berkelanjutan, yaitu pembangunan pariwisata tidak menimbulkan efek negatif terhadap ekosistem setempat. Selain itu, konservasi merupakan kebutuhan yang harus diupayakan untuk melindungi sumber daya alam dan lingkungan dari efek negatif kegiatan pariwisata
b. Aspek sosial yang berkelanjutan, yaitu mengacu pada kemampuan penduduk lokal untuk menyerap usaha pariwisata (industri dan wisatawan) tanpa menimbulkan konflik sosial.
c. Aspek budaya yang berkelanjutan, yaitu masyarakat lokal mampu beradaptasi dengan budaya wisatawan



d. Aspek ekonomi yang berkelanjutan, yaitu keuntungan yang didapat dari kegiatan pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan kepariwisata merupakan sebuah tahapan lanjutan dalam proses pengelolaan wisata. Tidak hanya dalam infrastruktur saja namun terdapat aspek-aspek lain didalamnya. Pelaksanaan pengembangan kepariwisataan perlu dilibatkan berbagai pihak didalamnya, dengan dasar hukum dan kebijakan yang berlaku pada suatu daerah. Standariasi dan juga hukum yang berlaku serta kebijakan yang ada menjadi syarat bagi sebuah destinasi atau tempat wisata dilakukan pengembangan. Sehingga pada pelaksanaanya dalam kegiatan pengembengan kepariwisataan memiliki dasar dan pengembangan yang jelas.

World Tourism and Travel Council (WTTC) bersama-sama dengan *World Tourism Organization dan Earth Council* juga menuangkan konsep pariwisata berkelanjutan untuk Industri Perjalanan dan Pariwisata. Piagam tersebut memuat tentang beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan. Adapun prinsip dan sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a) Pembangunan pariwisata harus berdasarkan kriteria keberlanjutan dapat didukung secara ekologis dalam waktu yang lama, layak secara ekonomi, adil secara etika dan sosial bagi masyarakat setempat.
b) Pariwisata harus berkontribusi kepada pembangunan berkelanjutan dan diintegrasikan dengan lingkungan alam, budaya dan manusia.
c) Pemerintah dan otoritas yang kompeten, dengan partisipasi lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat setempat harus mengambil tindakan untuk mengintegrasikan perencanaan



pariwisata sebagai kontribusi kepada pembangunan berkelanjutan.

d) Pemerintah dan organisasi multilateral harus memprioritaskan dan memperkuat bantuan, langsung atau tidak langsung, kepada proyek-proyek pariwisata yang berkontribusi kepada perbaikan kualitas lingkungan.
e) Ruang-ruang dengan lingkungan dan budaya yang rentan saat ini maupun di masa depan harus diberi prioritas khusus dalam hal kerjasama teknis dan bantuan keuangan untuk pembangunan pariwisata berkelanjutan.
f) Promosi/dukungan terhadap berbagai bentuk alternatif pariwisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
g) Pemerintah harus mendukung dan berpartisipasi dalam penciptaan jaringan untuk penelitian, diseminasi informasi dan transfer pengetahuan tentang pariwisata dan teknologi pariwisata berkelanjutan.
h) Penetapan kebijakan pariwisata berkelanjutan memerlukan dukungan dan sistem pengelolaan pariwisata yang ramah lingkungan, studi kelayakan untuk transformasi sektor, dan pelaksanaan berbagai proyek percontohan dan pengembangan program kerjasama internasional.

Daya tarik wisata merupakan hal penting dalam pariwisata, kualitas destinasi wisata yang baik berpengaruh positif terhadap jumlah pengunjung dan lama tinggal di destinasi wisata tersebut. Dalam hal ini, persepsi wisatawan merupakan kriteria untuk menentukan tingkat kualitas suatu daya tarik wisata. James J. Spillane (1994) berpendapat bahwa suatu objek wisata harus meliputi lima

unsur penting agar wisatawan merasa puas dalam menikmati perjalanannya, yaitu sebagai berikut. (James, 1994)

a) Atraksi

Atraksi adalah pusat dari industri pariwisata. Atraksi merupakan sesuatu yang mampu menarik wisatawan yang ingin mengunjunginya. Motivasi wisatawan untuk mengunjungi suatu tempat tujuan wisata adalah untuk memenuhi atau memuaskan beberapa kebutuhan atau permintaan. Biasanya para wisatawan tertarik pada suatu lokasi karena ciri-ciri khas tertentu. Kriteria ini dapat diuraikan menjadi beberapa indikator sebagai berikut.

1) Memiliki daya tarik wisata khususnya daya tarik wisata budaya
2) Memiliki setidaknya lebih dari satu atraksi yang memanfaatkan dan menjunjung tinggi budaya local

b) Fasilitas

Unsur fasilitas cenderung berorientasi pada atraksi disuatu lokasi karena fasilitas harus dekat dengan pasarnya. Fasilitas cenderung mendukung dan bukan mendorong pertumbuhan dan cenderung berkembang pada saat yang sama atau sesudah atraksi berkembang. Suatu atraksi juga dapat merupakan fasilitas. Jumlah dan jenis fasilitas tergantung kebutuhan wisatawan. Menurut Gunn dan Turgut (2002), fasilitas merupakan fasilitas pelayanan dan sarana prasarana penunjang pariwisata yang nantinya akan dapat memenuhi kebutuhanwisatawan selama berwisata di suatu tempat. Dalam karakteristik ini, fasilitas yang dimaksud meliputi fasilitas

dasar dan penunjang kegiatan wisata. Kriteria ini dapat diuraikan menjadi beberapa indikator sebagai berikut: (Gunn dan Turgut , 2002)

1) Memiliki fasilitas penginapan atau akomodasi setidaknya di sekitar lokasi kampung wisata
2) Memiliki fasilitas perbelanjaan baik di dalam maupun di sekitar lokasi kampung wisata
3) Memiliki fasilitas tempat makan setidaknya di sekitar lokasi kampung wisata
4) Memiliki fasilitas dasar pariwisata (meliputi ruang publik, informasi, peribadatan, keamanan, sanitasi, dll) dan fasilitas penunjang pariwisata yang dapat mendukung pengembangan dan pensuasanaan objek daya tarik wisata (area pertunjukkan kesenian, panggung kesenian, bangku penonton)
5) Terdapat perbaikan atau pembangunan fasilitas penunjang kegiatan wisata

c) Infrastruktur

Unsur Atraksi dan fasilitas tidak dapat tercapai dengan mudah jika belum terdapat infrastruktur dasar. Infrastruktur termasuk semua konstruksi di bawah dan di atas tanah dan suatu wilayah atau daerah

d) Transfortasi

Unsur transportasi meliputi unsur pengangkutan serta moda bagi wisatawan untuk mencapai tempat wisata

e) Keramah Tamahan

Unsur keramahan meliputi unsur penerimaan masyarakat lokal terhadap wisatawan. Wisatawan yang sedang berada dalam lingkungan yang belum mereka kenal maka



kepastian akan jaminan keamanan sangat penting, khususnya wisatawan asing.

2. Pengembangan Desa Wisata

Pembangunan adalah suatu usaha untuk memajukan suatu benda atau hal agar menjadi lebih baik dan berguna untuk kepentingan bersama. Biasanya, pembangunan dilakukan secara terencana guna mencapai tujuan yang ingin dicapai. Pengembangan desa wisata itu sendiri bertujuan untuk menjaga keberlanjutan wisata desa kerajinan, memanfaatkan lokalitas, mendorong masyarakat pedesaan untuk memanfaatkan potensi komersial ini, dan juga meningkatkan citra desa desa kerajinan. Ada lima jenis model pengembangan desa wisata yaitu wisata budaya, wisata alam, wisata buatan, wisata atraktif dan wisata religi (Rochman, 2016)

Desa wisata adalah suatu bentuk integrase antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyrakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. (Nuryanti, Wiendu 1993). Terdapat dua konsep yang utama dalam komponen desa wisata : (Nuryanti, 1994)

a. Akomadasi : sebagian dari tempat tinggal para penduduk setempat dan atau unit-unit yang berkembang atas konsep tempat tinggal penduduk.
b. Atraksi : seluruh kehidupan keseharian penduduk setempat beserta pengaturan fisik lokasi desa yang memungkinkan berintegrasinya wisatawan sebagai partisipasi aktif

Sementar itu pengertian Desa Wisata Menurut Nuryanti, Desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yan menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.



Sedangkan menurut Joshi, Desa wisata (rural tourism) merupakan pariwisata yang terdiri dari keseluruhan pengalaman pedesaan, atraksi alam, tradisi, unsur-unsur unik yang secara keseluruhan dapat menarik minat wisatawan

Mengutip dari pendapat Subagyo, jika dilihat dari perspektif kehidupan masyarakatnya, pariwisata pedesaan atau desa wisata merupakan suatu bentuk wisata dengan objek dan daya tarik berupa kehidupan desa yang memiliki ciri-ciri khusus dalam masyarakatnya, panorama alam dan budayanya, sehingga mempunyai peluang untuk dijadikan komoditi bagi wisatawan khususnya wisatawan asing. Kehidupan desa sebagai tujuan wisata adalah desa sebagai objek sekaligus juga sebagai subjek dari kepariwisataan yaitu sebagai pihak penyelenggara sendiri dari berbagai aktivitas kewisataan dan hasilnya akan dinikmati oleh masyarakat secara langsung. Oleh karena itu peran aktif masyarakat sangat menentukan kelangsungan kegiataan desa ini.

Keberhasilan wisata desa atau desa wisata sangat dipengaruhi oleh intensitas kegiatan, lokasinya, manajemen dan dukungan dari masyarakat lokal dan harus sesuai dengan keinginan masyarakat lokal dan tidak direncanakan secara sepihak. Mendapat dukungan dari masyarakat setempat bukan hanya dari individu atau suatu kelompok tertentu. Inisiatif menggerakkan modal usaha, profesionalisme pemasaran, citra yang jelas harus dikembangkan karena keinginan wisatawan adalah mencari hal yang spesial dan produk yang menarik.

Keberadaan desa wisata akan memunculkan kembali nilai-nilai kearifan local di satu kawasan yang mungkin sebelumnya tidak dihiraukan. Di setiap wilayah, selalu ada nilai kearifan lokal yang menonjol, baik yang berupa sikap timbal balik (saling peduli), estetika (mengutakan keindahan), rekreatif (banyak mengutamakan nilai-nilai



rekreasi), ilmiah (mengutamakan perkembangan ilmu pengetahuan), maupun konservasi (perlindungan terhadap lingkungan alam dan budaya)

Desa wisata juga akan membantu meningkatkan peran serta masyarakat terhadap pembangunan. Masyarakat akan terdorong untuk menjadi masyarakat yang kreatif, inovatif, kooperatif, dan terbuka terhadap perubahan. Sikap-sikap inilah yang akan mendorong masyarakat untuk melindungi asetaset di wilayah tersebut yang sebelumnya kurang diperhitungkan, seperti seni gerak (tari, drama, dll), seni kriya (batik, desain, kain, kerajinan patung, seni ukir, dll), seni sastra (karya sastra, puisi, tembang, film, dll), maupun cagar budaya (museum, peninggalan sejarah,). Kondisi ini akan mendorong lahirnya semangat wirausaha atau entrepeneurship di kalangan masyarakat. Dengan demikian, secara tidak langsung akan meningkatkan jumlah wirausaha mandiri yang mendorong perkembangan kemajuan ekonomi, baik secara mikro maupun makro. Inilah yang akan menguatkan kembali modal sosial masyarakat untuk pembangunan secara umum,

Dengan demikian, perlulah kiranya dilakukan satu pemberdayaan desa atau wilayah secara keseluruhan yang melibatkan masyarakat dengan seluruh aspek kekayaan alam dan budayanya untuk meningkatkan kemakmuran.

3. Pengembangan dan Pengelolaan Desa Wisata

Menurut Cooper, destinasi wisata harus memiliki empat aspek utama (4A) yaitu Attracktion (Daya tarik), *Accessibility* (Keterjangkauan), *Amenity* (fasilitas pendukung), dan *Ancilliary* (organisasi / kelembagaan pendukung)

a. *Attracktion* (Daya tarik) yaitu produk utama sebuah destinasi yang berkaitan dengan apa yang bisa dilihat dan dilakukan oleh wisatawan di desa wisata tersebut. Atraksi bisa berupa keindahan alam, budaya masyarakat setempat, sarana permainan dan sebagainya.
b. *Accessibility* (Keterjangkauan) adalah sarana dan infrastruktur untuk menuju ke desa wisata berupa akses jalan raya, ketersediaan sarana transportasi dan rambu-rambu petunjuk jalan.
c. *Amenity* (fasilitas pendukung) yaitu segala fasilitas pendukung yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan wisatawan selama berada di destinasi. Amenitas ini berkaitan dengan ketersediaan sarana akomodasi untuk menginap serta restoran atau warung untuk makan dan minum di lokasi destinasi desa wisata.
d. *Ancilliary* (organisasi/kelembagaan pendukung) yakni berkaitan dengan ketersediaan sebuah organisasi atau orang-orang yang mengurus desa wisata tersebut.

4. Kearifan Lokal dalam Pengembangan Desa Wisata

Setiap destinasi wisata sering tidak dapat mempertahankan keaslian dan keunikan dari budaya dan kehidupan sosial masyarakat. Hal ini terjadi karena struktur sosial masyarakat mengalami perubahan atau penambahan produk sesuai dengan pengembangan usaha wisata. Tidak sedikit produk baru tersebut dapat merusak nilai-nilai luhur masyarakat yang seharusnya tetap dijaga dan dipertahankan. Oleh karena itu, perlu diperlukan pemikiran mengenai langkahlangkah masyarakat dan pemerintah supaya pengembangan destinasi wisata

tidak mengubah karakteristik objek wisata maupun kehidupan masyarakat yang ada di dalamnya.

Pada umunya budaya lokal memiliki nilai-nilai yang tinggi, baik nilai yang bersifat filosofis maupun sosiologis. Dapat dikatakan budaya lokal merupakan sesuatu yang eksotis. Kata eksotis diartikan sebagai yang asing, atau belum diketahui orang banyak sehingga merangsang rasa ingin tahu (Spillane 1994). Keindahan alam, kehidupan sosial, kekayaan spiritual merupakan daya tarik yang bisa mengundang rasa ingin tahu masyarakat luar. Oleh karena itu, ke eksotisan ini harus ditampilkan dalam keaslian sehingga menjadi daya tarik utama dalam destinasi wisata.

Untuk menjaga kelestarian nilai kearifan lokal di kawasan wisata, harus melibatkan peran serta masyarakat melalui kegiatan pariwisata yang berbasis masyarakat. Hal ini bisa dilakukan dengan cara membangun kelompok masyarakat yang aktif dan peduli terhadap kegiatan pelestarian kawasan wisata. Keterlibatan Masyarakat dalam kelompok ini sebagai wujud kongkrit tindakan masyarakat yang peduli terhadap kawasan wisata sekaligus potensi sumber daya alam lainnya. Melalui sebuah komunitas pemeliharaan kelestarian alam bisa diwujudkan. Wujud kearifan lokal ada di dalam kehidupan masyarakat yang mengenal dengan baik lingkungannya, masyarakat hidup berdampingan dengan alam secara harmonis, memahami cara memanfaatkan sumberdaya alam secara arif dan bijaksana. Kearifan lokal dalam wujud pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan merupakan wujud konservasi masyarakat.



III KONSEP PENGEMBANGAN DESA WISATA BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Pengantar

Konsep pengembangan desa wisata adalah menjadikan desa sebagai sebuah destinasi pariwisata. Dengan cara memadukan daya tarik wisata alam dan budaya, dan layanan fasilitas umum pariwisata, serta aksesibilitas yang memadai, dengan tata cara dan tradisi kehidupan masyarakat desa. Prinsip utama dalam desa wisata adalah desa membangun, yaitu fokus kepada pemberdayaan masyarakat untuk dapat membangun desanya secara mandiri. Pengembangan desa wisata merupakan misi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata, sesuai dengan potensi dan sumber daya lokal.

Bag 1
Konsep Pengembangan Desa Wisata

Tujuan pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini, peserta diharapkan mampu:

- Menjelaskan tentang Konsep Pengembangan Desa Wisata
- Menguraikan tentang Konsep Pengembangan Desa Wisata

1. Konsep Pengembangan Desa Wisata

Desa memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, karena memasok hampir seluruh kebutuhan pangan nasional. Demikian pula, desa memasok kebutuhan tenaga kerja yang cukup besar di kota. Namun kehidupan di desa saat ini belum berkembang



sebagaimana mestinya. Banyak penduduk desa tak lagi tertarik untuk bekerja di perdesaan.

Konsep pengembangan desa wisata adalah menjadikan desa sebagai sebuah destinasi pariwisata. Dengan cara memadukan daya tarik wisata alam dan budaya, dan layanan fasilitas umum pariwisata, serta aksesibilitas yang memadai, dengan tata cara dan tradisi kehidupan masyarakat desa. Prinsip utama dalam desa wisata adalah desa membangun, yaitu fokus kepada pemberdayaan masyarakat untuk dapat membangun desanya secara mandiri. Pengembangan desa wisata merupakan misi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata, sesuai dengan potensi dan sumber daya lokal.

Prinsip pengembangan desa wisata adalah sebagai salah satu produk wisata alternatif yang dapat memberikan dorongan bagi pembangunan pedesaan yang berkelanjutan serta memiliki prinsipprinsip pengelolaan antara lain, ialah: (1) memanfaatkan sarana dan prasarana masyarakat setempat, (2) menguntungkan masyarakat setempat, (3) berskala kecil untuk memudahkan terjalinnya hubungan timbal balik dengan masyarakat setempat, (4) melibatkan masyarakat setempat, (5) menerapkan pengembangan produk wisata pedesaan, dan beberapa kriteria yang mendasarinya seperti antara lain:

1. Penyediaan fasilitas dan prasarana yang dimiliki masyarakat lokal yang biasanya mendorong peran serta masyarakat dan menjamin adanya akses ke sumber fisik merupakan batu loncatan untuk berkembangnya desa wisata.

2. Mendorong peningkatan pendapatan dari sektor pertanian dan kegiatan ekonomi tradisional lainnya.
3. Penduduk setempat memiliki peranan yang efektif dalam proses pembuatan keputusan tentang bentuk pariwisata yang memanfaatkan kawasan lingkungan dan penduduk setempat memperoleh pembagian pendapatan yang pantas dari kegiatan pariwisata.
4. Mendorong perkembangan kewirausahaan masyarakat setempat.

Sedangkan dalam prinsip perencanaan yang perlu dimasukkan dalam "prelemenay, planning" yaitu (1) meskipun berada di wilayah pariwisata tak semua tempat dan zona lingkungan harus menjadi daya tarik wisata dan (2) potensi desa wisata tergantung juga kepada kemauan masyarakat setempat untuk bertindak kreatif, inovatif, dan kooperatif. Tidak semua kegiatan pariwisata yang dilaksanakan di desa adalah benar-benar bersifat desa wisata, oleh karena itu agar dapat menjadi pusat perhatian pengunjung, desa tersebut pada hakikatnya harus memiliki hal yang penting, antara lain:

1. Keunikan, keaslian, sifat khas
2. Letaknya berdekatan dengan daerah alam yang luar biasa
3. Berkaitan dengan kelompok atau masyarakat berbudaya yang secara hakiki menarik minat pengunjung
4. Memiliki peluang untuk berkembang baik dari sisi prasarana dasar, maupun sarana lainnya.

Perencanaan pariwisata di desa bukanlah tugas yang mudah terutama dalam keadaan yang mempunyai lingkungan alam dan budaya yang peka.



2. Konsep Kawasan Desa wisata

Kebudayaan membuat perkampungan dimulai sejak manusia merasa atau terpaksa oleh kebutuhan atas rumah tempat berdiam, kebudayaan perkampungan di mulai sejak manusia mulai menyusun kehidupan masyarakat. Perkampungan masyarakat Sunda memiliki nilai-nilai keunikan, tidak saja karena bentuk fisik kampung yang ditunjang oleh bentuk-bentuk rumah yang berciri khas dan mengandung banyak nilai filosofi dari adat kebiasaan secara khusus. Selain dari rumah, juga tanah tempat rumah itu dibangun (lahan) menjadi bahan perhatian yang tidak kurang pentingnya.

Pola perkampungan masyarakat mencerminkan satu kesatuan yang utuh yang satu sama lain ditampilkan melalui formasi dan komposisi rumah, rumah yang berdekatan, dengan memusat (bertitik pusat) kepada satu bangunan milik orang yang dipertuakan di kampung itu, orang itu disebutnya sesepuh. Pola kampung secara keseluruhan terdiri dari rumah-rumah yang berhubungan dengan berbagai fasilitas yang mencerminkan pola hidup harmonis dalam kesatuan lingkungan, sehingga merupakan perpaduan antara aspek-aspek yang keramat (sacral) dan lingkungan yang tetap terpelihara dalam suasana silih asah, silih asih dan silih asuh sebagai satu konsep saling menyayangi di antara keluarga, kerabat dan paling utama adalah cerminan sikap gotong royong masyarakat dalam segala bentukprilaku dan kehidupan. harmonisasi dan pengembangan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya dan lingkungan dalam pola perkampungan yang memiliki kemampuan untuk memberikan penyesuaian dan harmonisasi antara religi dan kemajuan teknologi serta modernisasi.



3. Pendekatan Kawasan Desa wisata

Pentingnya suatu pendekatan dalam proses pembangunan pemodelan agar dalam upaya pembangunan tetap berorientasi kepada kepentingan masyarakat setempat, lingkungan dan peletakan/pembagian zonasi yang tepat dan penataan. Lanskap yang didasarkan kepada kondisi, potensi alam serta karakter sosial, budaya serta ekonomi masyarakat setempat. Adapun pendekatan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan kualitas lingkungan masyarakat, dasar utama yang senantiasa harus dijaga keutuhannya, sehingga situasi konflik tidak akan timbul bila langkah-langkah pendekatan dengan segala kearifan untuk memenuhi fungsi-fungsi timbal balik, estetika, rekreatif, ilmiah dan konservasi.
b. Pendekatan perencanaan fisik yang meliputi daya tamping ruang, pemilihan daya tampung ruang, pemilihan lokasi yang tepat serta peletakan zonasi yang seimbang antara zona inti, zona penyangga, dan zona pelayanan, fisis, tanah, air dan iklim biotis.
c. Pendekatan terhadap unsur-unsur pariwisata yang dapat dibangun dalam hubungan dengan pemenuhan kebutuhan fasilitas bagi wisatawan.
d. Pendekatan dasar rencana tapak yang berkaitan dengan peletakan fisik, sistem transportasi, sistem utilitas tipologis, pola penghijauan, pola disain/arsitektural, tata bangunan, topografi, iklim, desain lanskap.
e. Pendekatan struktur geo-klimatologis dan geo-morfologis setempat harus mendukung kesuburan dan keindahan seperti karakter, pegunungan/perbukitan yang indah, udara yang sejukserta kondisi hidrologis yang memungkinkan, budi daya



pertanian berkembang. hubungan antara wisatawan dan penduduk setempat dan melindungi masyarakat dari melimpahnya kegiatan pariwisata.

Unsur penting berikutnya dalam kawasan desa wisata yang berkelanjutan adalah pelatihan masyarakat dari berbagai tingkat pendidikan, karena jenis pariwisata ini memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional dalam pengelolaannya. Unsur penting lainnya adalah yang erat kaitannya dengan pembentukan kelompok pengusaha setempat, pembinaan kelompok pengusaha lokal dapat membentuk suatu fungsi yang bermanfaat dan sungguh dapat memunculkan usaha-usaha baru. Nilainya dapat diperoleh dengan memajukan/menampilkan produk lokal seperti barang kerajinan makanan khas, minuman dan produk-produk lainnya yang memberikan cita rasa kepada wisatawan tentang daerah tersebut dan dapat digunakan untuk mempromosikan kekhasan tersebut kepada wisatawan. Semua itu adalah produk yang dapat dimanfaatkan oleh usaha pariwisata lokal sendiri, dengan demikian memajukan ciri lokal mereka sendiri dan mengembalikan lebih banyak uang ke ekonomi daerah tersebut. Pembentukan kelompok pengusaha lokal juga dapat memperkuat kedudukan pengusaha kecil yang perlu banyak berpegangan tangan agar menjadi kuat dan mapan.

Keaslian memberikan manfaat bagi produk wisata, termasuk desa wisata. Keaslian yang utama adalah kualitas, asli, keorsinilan, keunikan, khas daerah dan kebanggaan daerah. Keaslian itu dapat terwujud pula melalui gaya hidup dan kualitas hidup masyarakat dan secara khusus berkaitan dengan prilaku integritas, keramahan dan kesungguhan penduduk yang tinggal dan berkembang menjadi masyarakat daerah tersebut. Keaslian juga dipengaruhi oleh keaslian ekonomi, fisik dan sosial daerah pedesaan tersebut misalnya warisan



budaya, pertanian, bentangan alam, jasa dan yang paling penting adalah peristiwa sejarah dan budaya dari daerah itu.



IV PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pengantar

Pemberdayaan adalah proses menolong suatu kelompok atau masyarakat untuk mencapai pengaruh secara politik atau otoritas hukum yang relevan (Barker dalam Huraerah, 2021). Dalam teknik pemberdayaan, upaya diarahkan untuk memungkinkan orang menyadari akan hak-haknya, dan mengajari mereka mengenai cara mengolah hak-haknya, sehingga mereka lebih memiliki kemampuan dalam mengendalikan berbagai faktor yang mempengaruhi kehidupannya. Hal ini seringkali ditemukan bahwa masyarakat yang miskin dan berpendidikan rendah, tidak mengerti apa hak-hak yang sebenarnya dimilikinya. Misalnya, hak untuk memperoleh pelayanan sosial atau hak untuk hidup layak. Dengan demikian, mereka tidak mengerti bagaimana cara memperolehnya. Untuk itu, mereka disadarkan dengan pemberian pengetahuan yang sesuai, selanjutnya mereka dibimbing dan didorong untuk memperolehnya.



Bagian. 1
Pengertian, Tujuan, dan Tingkatan Keberdayaan Masyarakat

Tujuan pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini, peserta diharapkan mampu:

- Memahami pengertian pemberdayaan masyarakat
- Menjelaskan tentang tujuan pemberdayaan masyarakat
- Menjelaskan tentang tingkatan keberdayaan masyarakat

Berubahnya paradigma pembangunan nasional ke arah demokratisasi dan desentralisasi, menumbuhkan kesadaran yang luas tentang perlunya peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses dan program pembangunan. Pemberdayaan muncul sebagai kata yang banyak diungkapkan ketika berbicara tentang pembangunan. Meskipun demikian, pentingnya pemberdayaan masyarakat belum sepenuhnya dihayati dan dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan, baik dari kalangan pemerintah, swasta, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), dan masyarakat. Bahkan di kalangan masyarakat sendiri masih gamang menghadapi praktik partisipasi dalam melaksanakan setiap tahapan pembangunan di lingkungannya. Di sisi lain, hampir semua program pemerintah mensyaratkan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaanya, dimana masyarakat ditempatkan pada posisi strategis yang menentukan keberhasilan program pembangunan. Namun, dalam praktiknya pemberdayaan masyarakat sering disalahgunakan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan yang diadaptasikan dari istilah empowerment berkembang di Eropa mulai abad pertengahan, terus berkembang hingga diakhir 70-an, 80-an, dan awal 90-an. Konsep pemberdayaan



tersebut kemudian mempengaruhi teori-teori yang berkembang belakangan. Berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat, Ife (1995) menyatakan bahwa "*empowerment is a process of helping disadvantaged groups and individual to compete more effectively with other interests, by helping them to learn and use in lobbying, using the media, engaging in political action, understanding how to 'work the system,' and so on*" (Ife, 1995). Definisi tersebut mengartikan konsep pemberdayaan (*empowerment*) sebagai upaya memberikan otonomi, wewenang, dan kepercayaan kepada setiap individu dalam suatu organisasi, serta mendorong mereka untuk kreatif agar dapat menyelesaikan tugasnya sebaik mungkin.

Di sisi lain Paul (1987) dalam Prijono dan Pranarka (1996) mengatakan bahwa pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan pada kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap "proses dan hasil-hasil pembangunan."Sedangkan konsep pemberdayaan menurut Friedman dalam hal ini pembangunan alternatif menekankan keutamaan politik melalui otonomi pengambilan keputusan untuk melindungi kepentingan rakyat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung melalui partisipasi, demokrasi dan pembelajaran sosial melalui pengamatan langsung. Jika dilihat dari proses operasionalisasinya, maka ide pemberdayaan memiliki dua kecenderungan, antara lain: (Friedman, 1992) pertama, kecenderungan primer, yaitu kecenderungan proses yang memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan (*power*) kepada masyarakat atau individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi; dan kedua, kecenderungan sekunder, yaitu

kecenderungan yang menekankan pada proses memberikan stimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Dua kecenderungan tersebut memberikan (pada titik ekstrem) seolah berseberangan, namun seringkali untuk mewujudkan kecenderungan primer harus melalui kecenderungan sekunder terlebih dahulu . Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. (Sumodiningrat., 2002) Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat "people centred, participatory, empowering, and sustainable". Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa yang lalu. (Chambers, 1995)

Konsep ini berkembang dari upaya banyak ahli dan praktisi untuk mencari apa yang antara lain oleh Friedman (1992) disebut sebagai alternative development, yang menghendaki "*inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality and intergenerational equaty*". (Kartasasmita, 1997) Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu: (Sumodiningrat., 2002) pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk

membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasikan, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini.

Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasiannya ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Dalam hal ini, yang terpenting adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan, pengamalan demokrasi. Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya



persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*). Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertikarkan dengan pihak lain). Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk mencapai keadilan sosial. Payne (1997:268) menyatakan keadilan sosial dengan memberikan ketentraman kepada masyarakat yang lebih besar serta persamaan politik dan sosial melalui upaya saling membantu dan belajar melalui pengembangan langkah-langkah kecil guna tercapainya tujuan yang lebih besar.

3. Tingkatan Keberdayaan Masyarakat

Menurut Susiladiharti dalam Huraerah (2011) terbagi ke dalam lima tingkatan, yakni:

1) Terpenuhinya kebutuhan dasar
2) Terjangkaunya sistem sumber atau akses terhadap layanan publik
3) Kesadaran akan kekutan dan kelemahan atas diri sendiri dan juga lingkungannya
4) Mampu untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang bermanfaat di masyarakat dan lingkungan yang lebih luas
5) Kemampuan untuk mengendalikan diri dan lingkungannya. Tingkatan kelima ini dapat dilihat dari keikutsertaan dan dinamika

masyarakat dalam mengevaluasi dan mengendalikan berbagai program dan kebijakan institusi dan pemerintahan.

Jika dibuat kedalam sebuah bagan, maka tingkat keberdayaan ini berbentuk:



Gambar
Tingkat Keberdayaan Masyarakat Menurut Susiladiharti
(Huraerah, 2011)



Bagian. 2
Aspek dan Indikator Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini, peserta diharapkan mampu:

- Menjelaskan tentang aspek-aspek pemberdayaan masyarakat
- Menguraikan tentang indikator pemberdayaan masyarakat

1. Aspek-aspek Pemberdayaan Masyarakat

Dalam kerangka ini upaya untuk memberdayakan masyarakat (empowering) dapat dikaji dari 3 (tiga) aspek:

Pertama, ***ENABLING*** yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. Asumsinya adalah pemahaman bahwa setiap orang, setiap masyarakat mempunyai potensi yang dapat dikembangkan artinya tidak ada orang atau masyarakat tanpa daya. Pemberdayaan adalah upaya untuk membanguna daya dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat serta upaya untuk mengembangkannya.

Kedua, ***EMPOWERING*** yaitu memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya. Upaya yang paling pokok dalam empowerment ini adalah meningkatkan taraf pendidikan dan derajat kesehatan serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi (modal, teknologi, informasi, lapangan keja, pasar) termasuk pembangunan sarana dan prasarana dasar seperti (irigasi, jalan, listrik, sekolah, layanan kesehatan) yang dapat dijangkau lapisan masyarakat

paling bawah yang keberdayannya sangat kurang. Oleh karena itu diperlukan program khusus, karena programprogram umum yang berlaku untuk semua tidak selalu menyentuh kepentingan lapisan masyarakat seperti ini.

Ketiga, ***PROTECTING*** yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya merupakan unsur penting, sehingga pemberdayaan masyarakat sangat erat hubungannya dengan pementapan, pembudayaan dan pengalaman demokrasi (Friedmann, 1994). Pendekatan pemberdayaan pada intinya memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung, demokratis dan pembelajaran sosial. Dalam hal ini Friedmann (1994) menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat tidak hanya sebatas bidang ekonomi saja tetapi juga secara politis, sehingga pada akhirnya masyarakat akan memiliki posisi tawar (*bargaining position*) baik secara nasional maupun internasional. Sebagai titik fokusnya adalah aspek lokalitas, karena *civil society* akan merasa lebih siap diberdayakan lewat isu-isu lokal.

2. Indikator Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan memang sebuah proses. Namun, dari proses tersebut dapat dilihat dengan indikator-indikator yang menyertai proses pemberdayaan menuju sebuah keberhasilan. Untuk mengetahui pencapaian tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang atau komunitas berdaya atau tidak. Dengan cara ini kita dapat melihat ketika sebuah program pemberdayaan sosial diberikan,

segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan (misalnya keluarga miskin) yang perlu dioptimalkan.

Keberhasilan pemberdayan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan meraka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan akses kesejahteraan, dan kemampuan kultur serta politis.

Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu: 'kekuasaan di dalam' (*power within*), 'kekuasaan untuk' (*power to*), 'kekuasaan atas' (*power over*) dan 'kekuasaan dengan (*power with*). Dari beberapa dasar tersebut, berikut ini sejumlah indikator yang dapat dikaitkan dengan keberhasilan dari pemberdayaan (Suharto, 2005):

1. Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, ke rumah tangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian.
2. Kemampuan membeli komoditas kecil: kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, minyak goreng, bumbu); kebutuhan dirinya (minyak rambut, shampo, rokok, bedak). Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin orang lain termasuk pasangannya, terlebih jika ia dapat membeli barang-barang dengan menggunakan uangnya sendiri.
3. Kemampuan membeli komoditas besar: kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, TV, radio, koran, majalah, pakaian keluarga. Seperti halnya indikator diatas, point tinggi diberikan terhadap individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin dari orang lain, terlebih jika ia dapat membeli dengan uangnyasendiri.

4. Terlibat dalam membuat keputusan-keputusan rumah tangga: mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama (suami/istri) mengenai keputusan keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah, pembelian kambing untuk ternak, memperoleh kredit usaha.
5. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga: responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorang (suami, istri, anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa ijinnya, yang melarang mempunyai anak, atau melarang bekerja di luar rumah.
6. Kesadaran hukum dan politik: mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa/kelurahan, seorang anggota DPRD setempat, nama presiden, mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.
7. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes seseorang dianggap 'berdaya' jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes, misalnya terhadap suami yang memukul isteri; isteri yang mengabaikan suami dan keluarganya; gaji yang tidak adil; penyalahgunaan bantuan sosial; atau penyalahgunaan kekuasaan polisi dan pegawai pemerintah.
8. Jaminan ekonomi dan kotribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, tanah, aset produktif, tabungan. Seseorang dianggap memiliki poin tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari pasangannya.



Bagian 3
Keterlibatan Berbagai Elemen dalam Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini, peserta diharapkan mampu:

- Menjelaskan tentang berbagai elemen yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat
- Menguraikan tentang mekanisme pelaksanaan pemberdayaan masyarakat

1. Elemen-elemen Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan oleh banyak elemen: pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pers, partai politik, lembaga donor, aktor aktor masyarakat sipil, atau oleh organisasi masyarakat lokal sendiri. Birokrasi pemerintah sangat strategis karena mempunyai banyak keunggulan dan kekuatan yang luar biasa ketimbang unsur-unsur lainnya: mempunyai dana, aparat yang banyak, kewenangan untuk membuat kerangka legal, kebijakan untuk pemberian layanan publik, dan lain-lain. Proses pemberdayaan bisa berlangsung lebih kuat, komprehensif dan berkelanjutan jika berbagai unsur tersebut membangun kemitraan dan jaringan yang didasarkan pada prinsip saling percaya dan menghormati (Eko, 2002).

2. Mekanisme Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat harus melibatkan berbagai potensi yang ada dalam masyarakat, beberapa elemen yang terkait, misalnya: Pertama, Peranan Pemerintah dalam artian birokrasi pemerintah harus dapat menyesuaikan dengan misi ini, mampu membangun partisipasi, membuka dialog dengan masyarakat, menciptakan instrument

peraturan dan pengaturan mekanisme pasar yang memihak golongan masyarakat bawah.

Kedua, organisasi-organisasi kemasyarakatan diluar lingkunan masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi kemasyarakatan nasional maupun lokal, Ketiga, lembaga masyarakat yang tumbuh dari dan didalam masyarakat itu sendiri (*local community organization*) seperti BPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa), PKK, Karang Taruna dan sebagainya. Keempat, koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat yang merupakan organisasi sosial berwatak ekonomi dan merupakan bangun usaha yang sesuai untuk demokrasi ekonomi Indonesia.

Kelima, Pendamping dierlukan karena masyarakat miskin biasanya mempuyai keterbatasan dalam pengembangan diri dan kelompoknya, Keenam, pemeberdayaan harus tercermin dalam proses perencanaan pembangunan nasional sebagai proses bottom-up. Ketujuh, keterlibatan masyarakat yang lebih mampu khususnya dunia usaha dan swasta.



Bagian 4

Proses Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini, peserta diharapkan mampu:

- Menjelaskan tentang proses pemberdayaan masyarakat
- Menjelaskan tentang siklus pemberdayaan masyarakat

1. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Miley and DuBois (Shera & Wells, 1999:3) menjelaskan bahwa *"through dialogue, workers develop collaborative partnerships with clients, articulate the aspects of challenging situations, and define the purposses to locate resources on which to construct plans for change. For development, workers and clients activate interpersonal and institutional resources, forge connections with other persons and systems, and create new oppotunities to distribute the resources of just society"*.

Dalam upaya agar masyarakat berdaya maka memerlukan intervensi. Ada beberapa tahapan intervensi yang direncanakan agar tercapai keberhasilan pemberdayaan tersebut. Tahapan yang dilakukan lebih dekat sebagai upaya pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat yang dilakukan diharapkan berujung pada terrealisasinya proses pemberdayaan masyarakat (Zubaedi, 2007). Menurut Adi (2013) tahapan dalam proses pengembangan masyarakat, yaitu:

1) Tahap persiapan (*engagement*)

Tahap persiapan dalam kegiatan pengembangan masyarakat terdiri dua hal, yaitu persiapan petugas dan persiapan lapangan. Persiapan petugas diperlukan untuk menyamakan persepsi antar anggota tim sebagai pelaku perubahan mengenai pendekatan apa yang akan dipilih dalam melakukan pengembangan masyarakat.



Sementara, persiapan lapangan dilakukan melalui studi kelayakan terhadap daerah yang akan dijadikan sasaran, baik dilakukan secara formal maupun informal. Jika sudah ditemukan daerah yangingin dikembangkan, petugas harus mencoba menerobos jalur formal untuk mendapat perizinan dari pihak terkait. Di samping itu,petugas juga harus menjalin kontak dengan tokoh-tokoh informal agar hubungan dengan masyarakat dapat terjalin dengan baik.

2) Tahap pengkajian (*assessment*)

Proses pengkajian yang dilakukan dengan mengidentifikasi masalah atau kebutuhan yang diekspresikan dan sumber daya yang dimiliki komunitas sasaran. Masyarakat dilibatkan secara aktif agar permasalahan yang keluar adalah dari pandanganmereka sendiri, dan petugas memfasilitasi warga untuk menyusun prioritas dari permasalahan yang mereka sampaikan. Hasil pengkajian ini akan ditindaklanjuti pada tahap berikutnya, yaitu tahap perencanaan.

3) Tahap perencanaan alternatif kegiatan (*planning*)

Pada tahap ini petugas secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi, bagaimana cara mengatasinya serta memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.

4) Tahap formulasi rencana aksi (*action plan formulation*)

Pada tahap ini petugas membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang akan mereka lakukan guna mengadaptasi permasalahan yang ada. Pada tahap ini diharapkan petugas dan masyarakat sudah dapat membayangkan dan menuliskan tujuan jangka pendek tentang apa yang akan dicapai dan bagaimana mencapai tujuan tersebut.

5) Tahap implementasi kegiatan (*implementation*) Tahap pelaksanaan ini merupakan salah satu tahap yang paling penting dalam proses pengembangan masyarakat, karena sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik dapat melenceng dalam pelaksanaan di lapangan bila tidak ada kerjasama antara pelaku perubahan dan warga masyarakat, maupun kerjasama antarwarga.
6) Tahap evaluasi (*evaluation*)

Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program yang sedang berjalan. Pada tahap ini sebaiknya melibatkan warga untuk melakukan pengawasan secara internal agar dalam jangka panjang diharapkan membentuk suatu sistem dalam masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Evaluasi dimaksudkan untuk memberikan umpan balik bagi perbaikan kegiatan.

Aspek-aspek dasar evaluasi adalah sebagai berikut:

- **Efektivitas:** melihat seberapa jauh rencana sudah tercapai atau apakah rencana sudah tercapai seperti yang direncanakan;
- **Efisiensi:** melihat perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dengan capaian yang dihasilkan;
- **Dampak:** melihat dampak program bagi masyarakat yang lebih luas;
- **Relevansi:** melihat apakah capaian program sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran (*target group*);
- **Keberlanjutan:** melihat seberapa jauh perubahan yang dihasilkan akan berkelanjutan.

Dalam mengevaluasi program pengembangan masyarakat harus ada kejelasan, aspek-aspek apa saja yang dievaluasi serta faktor-faktor apa saja yang menjadi kekuatan, kelemahan,



kesempatan, dan ancaman pelaksanaan program pengembangan masyarakat tersebut. Kemudian, dalam langkah evaluasi seharusnya menghasilkan rekomendasi untuk usaha-usaha perbaikan program pengembangan masyarakat ke depan. Kegiatan evaluasi dilakukan dengan menggunakan FGD (*Focus Group Discussion*).

Tahapan evaluasi yang harus dilakukan adalah:

- Mengevaluasi pelaksanaan program dengan metode yang tepat;
- Menganalis hasil evaluasi;
- Menindaklanjuti hasil evaluasi untuk perbaikan dan pengembangan.

7) Tahap terminasi (termination)

Tahap ini merupakan tahap 'perpisahan' hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Terminasi dilakukan seringkali bukan karena masyarakat sudah dianggap mandiri, tetapi karena proyek sudah harus dihentikan karena sudah melebihi jangka waktu yang ditetapkan sebelumnya, atau karena anggaran sudah selesai dan tidak ada penyandang dana yang dapat dan mau meneruskan program tersebut.

Ketujuh tahapan intervensi di atas merupakan proses siklikal yang dapat berputar guna mencapai perubahan yang lebih baik, terutama setelah dilakukan evaluasi proses (*monitoring*) terhadap pelaksanaan kegiatan yang ada. Siklus juga dapat berbalik di beberapa tahapan yang lainnya, misalnya ketika akan memformulasikan rencana aksi, ternyata petugas dan masyarakat merasakan ada keanehan atau perkembangan baru di masyarakat sehingga mereka memutuskan untuk melakukan pengkajian kembali (*reassessment*) terhadap apa yang sudah dilakukan sebelumnya.

2. Siklus Pemberdayaan Masyarakat





Bagian.5
Pendekatan dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini, peserta diharapkan mampu:

- Menjelaskan tentang pendekatan pemberdayaan masyarakat
- Menggunakan metode pemberdayaan masyarakat
- Menggunakan strategi pemberdayaan masyarakat

1. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut (Sumodiningrat, 2002): pertama, upaya itu harus terarah. Ini yang secara populer disebut pemihakan.Upaya ini ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya. Kedua, program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendakdan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu, sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya. Ketiga, menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-



sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalahmasalah yang dihadapinya. Juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas jika penanganannya dilakukan secara individu. Pendekatan kelompok ini paling efektif dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien.

Strategi pembangunan yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai proses transformasi dalam hubungan sosial, ekonomi, budaya dan politik masyarakat, sehingga perubahan struktural yang terjadi diharapkan merupakan proses yang berlangsung secara alami. Teori-teori ekonomi makro memerlukan intervensi yang tepat sehingga kebijaksanaan pada tingkat makro mendukung upaya menutup kesenjangan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat mikro yang langsung ditujukan kepada masyarakat lapisan bawah, sehingga pemberdayaan masyarakat (*empowering*) sebagai model pembangunan dapat menjadi jembatan bagi konsep-konsep pembangunan makro dan mikro.

2. Metode Pemberdayaan Masyarakat

Kartasasmita (1995:95) mengemukakan bahwa upaya memberdayakan rakyat harus dilakukan melalui tiga cara yaitu:

a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Kondisi ini berdasarkan asumsi bahwa setiap individu dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Hakikat dari kemandirian dam keberdayaan rakyat adalah keyakinan dan potensi kemandirian tiap individu perlu untuk diberdayakan. Proses pemberdayaan masyarakat berakar kuat pada proses kemandirian tiap individu, yang kemungkinan meluas ke keluarga, serta kelompok masyarakat baik ditingkat lokal maupun nasional.

b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan prasarana dan sarana yang baik fisik (irigasi, jalan dan listrik), maupun sosial (sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan paling bawah. Terbentuknya akses pada berbagai peluang akan membuat rakyat makin berdaya seperti tersedianya lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan dan pemasaran. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat ini yang penting antara lain adalah peningkatan mutu dan perbaikan sarana pendidikan dan kesehatan, serta akses pada sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi lapangan kerja serta pasar.
c. Memberdayakan masyarakat dalam arti melindungi dan membela kepentingan masyarakat yang lemah. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah atau mungkin terpinggirkan dalam menghadapi yang kuat oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah sangat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah.

3. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Huraerah (2008:87) mengungkapkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dalam bingkai usaha memperkuatapa yang lazim disebut *community self-reliance* atau kemandirian. Dalam proses ini masyarakat didampingi untuk membuat analisis masalah yang dihadapi, dibantu untuk menemukan alternatif solusi masalah



tersebut, serta diperlihatkan strategi memanfaatkan berbagai kemampuan yang dimiliki.

Bagaimana strategi atau kegiatan yang dapat diupayakan untuk mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat? Ada beberapa strategi yang dapat menjadi pertimbangan untuk dipilih dan kemudian diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat.

Pertama: menciptakan iklim, memperkuat daya, dan melindungi. Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu: pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di perdesaan, dimana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya amat kurang. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata- pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian

pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasiannya ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Yang terpenting disini adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan, pengamalan demokrasi.

Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai programpemberian (*charity*). Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertikarkan dengan pihak lain). Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.



DAFTAR PUSTAKA

Abdilah Fitra, L. (n.d.). *Digilib.uinsby*. Retrieved Des 2, 2022, from Digital Liberary Uin Sunan Karang Ampel Si=urabaya: http://digilib.uinsby.ac.id/19203/4/Bab% 202.pdf

Adityaji, R. (2018). Formulasi Strategi Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan Menggunakan Metode Analisis SWOT: Studi Kasus Kawasan Pecinan Kapasan Surabaya. *Jurnal Pariwisata Pesona*.

Agustino, L. (2020). *Dasar-dasar Kebijakan Publik.* Bandung: Alfabeta. BPS.

(2016). *PERKEMBANGAN PARIWISATA DAN TRANSPORTASIKALIMANTAN BARAT DESEMBER 2016.* KALIMANATAN BARAT: BADAN STATISTIK KALIMANTAN BARAT.

Chambers, R. (1995). *Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan Ekonomi dan Sosial, Pembangunan Desa Mulai dari Belakang.* Jakarta.

Friedman. (1992). *Empowerment, The Politics of Alternative Development.* Cambridge Mass: Blackwell Publisher.

Gunn dan Turgut . (2002). *Tourism Planning: Basics, Concepts, Cases, 4th edition.* New York: Routledge,.

Iwang Gumilar et al. (2015). VALUASI EKONOMI KEKAYAAN SUMBERDAYA KELAUTAN JAWA BARAT SELATAN. *Creative Research Journa*, 1-15.

James, S. (1994). *Pariwisata Indonesia, Siasat Ekonomi dan Rekayasa Kebuadayaan.* Yogyakarta: Karnisius.

Kartasasmita, G. (1997). *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pemnagunan yang Berakar Pada Masyarakat.* Yogyakarta: Universitas Gajah Mada. .

Kartikasari, R. (2016). Potensi Pengembangan Ekowisata di Green Canyon Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmu- Ilmu Pertanian "AGRIKA,*, 41-45.

Nugroho, R. (2014). *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.



Nuryanti, W. 1. (1994). *Concept, Perspective and Challenges.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Ritchi et al. (2018). *Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Upaya Peningkatan Aksesibilitas UKM (Desa Wisata) Kepada Pasar Di Lokasi Wisata Pangandaran Dan Sekitarnya. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat,.* Bandung: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat,Fak Ekonomi UNPAD.

Rorah, D. N. (2015). *PENGELOLAAN PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT (COMMUNITY BASED TOURISM) DI DESA WISATA KEBONAGUNG KECAMATAN IMOGIRI.* Yogyakarta: eprints@UNY.

Saefullah. (2007). Konsep dan Metode Pelayanan Umum yang Baik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.*

Samodra Wibawa. (1994). *Evaluasi kebijakan publik.* Jakarta: Raja Grafindo,.

Sondarika, et al. (2017). *Jurnal Artefak*, 35-46.

Sumodiningrat. (2002). *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat.* Jakarta: Bina Rena Pariwara.

Tachjan. (2008). *Implementasi Kebijakan Publik. Bandung.* AIPI.

Thomas, R. D. (2005). *Understanding Public Policy,.* New Jersey: Pearson Education In.

Winarno, B. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik. .* Yogyakarta: Media Pressindo.

Yoeti, O. .. (2008). *Pengantar Ilmu Pariwisata.* Bandung: Angkasa.